



BADAN  
PANGAN  
NASIONAL

NATIONAL  
FOOD  
AGENCY (NFA)



Laporan Kinerja  
**SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN PANGAN NASIONAL**  
TA. 2022

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN PANGAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bogor, 13 Februari 2023  
Inspektur Badan Pangan Nasional



Ir. R. Muhammad Imron Rosjidi, M.Si  
NIP 196907121993031001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 dapat tersusun secara baik. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan ini.

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 merupakan wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional sebagai unit kerja instansi pemerintah atas pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai sasaran/target di lingkup Sekretariat Utama. Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional. Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022, yang merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Tahun 2022 – 2024. Hasil dari laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Tahun 2022 merupakan tahun yang sangat berat bagi pemerintah Indonesia. Di saat dunia termasuk Indonesia sedang melakukan pemulihan pasca pandemi covid-19, kita dihadapkan dengan ancaman krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan akibat resesi ekonomi dan kondisi keamanan global. Bagi Badan Pangan Nasional tahun 2022 merupakan tahun yang tidak kalah berat. Tahun ini merupakan tahun transformasi organisasi dari Badan Ketahanan Pangan. Di tahun pertama ini Badan Pangan Nasional dituntut menjadi organisasi yang *agile* yang mampu beradaptasi dengan tantangan baru di era *Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity* ini. Kita mulai menyadari tantangan ke depan tidak akan lagi dapat diprediksi dengan

grafik perhitungan yang linier, sehingga perlu dilakukan berbagai inovasi dan perencanaan program/kegiatan strategis.

Sekretariat Utama sebagai salah satu unit kerja di Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional senantiasa melakukan adaptasi dan inovasi kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan ke depan. Meski tantangan ke depan semakin beragam dan sulit diprediksi, namun dengan semangat, sinergi, dan disiplin tinggi, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mampu untuk lebih baik lagi dari apa yang telah dicapai.

Keseluruhan pencapaian dalam laporan ini tidak lepas dari arahan dan kebijakan pimpinan serta peran seluruh pegawai dan pemangku kepentingan. Semoga segala upaya yang telah kita lakukan diridhoi oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin. Kami sangat menghargai kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, Februari 2023

Plt. Sekretaris Utama,



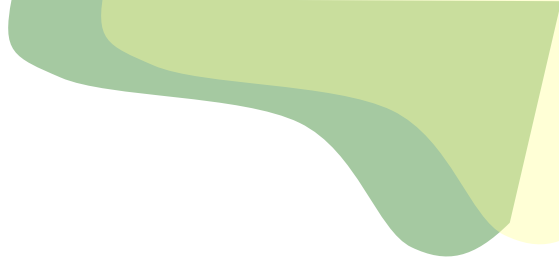
Sarwo Edhy

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	3
1.3. Organisasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.....	4
1.3.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	4
1.3.2. Struktur Organisasi.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.....	6
2.2. Arah Kebijakan, Strategi dan Program.....	9
2.3. Indikator Kinerja Utama .....	10
2.4. Pagu Anggaran.....	11
2.5. Perjanjian Kinerja .....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	13
3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan.....	14
3.1.2. Capaian Kinerja Program .....	16
3.1.3. Capaian Kinerja Kegiatan.....	22
3.1.4. Efisiensi Anggaran .....	38
3.2. Realisasi Anggaran .....	39
BAB IV PENUTUP .....	41
4.1. Kesimpulan .....	41
4.2. Saran dan Rekomendasi.....	42
LAMPIRAN .....	43

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1. Target Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022-2024 .....	8
Tabel 2. 2. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Capaian Kinerja Sekretariat Utama .....	10
Tabel 2. 3. Pagu Anggaran Sekretariat Utama Tahun 2022 Menurut Unit Kerja.....	11
Tabel 2. 4. Perjanjian Kinerja dan Pagu Anggaran Sekretaris Utama Tahun 2022.....	12
Tabel 3. 1. Capaian Kinerja Pada Tujuan 2 Tahun 2022.....	14
Tabel 3. 2. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Tahun 2022.....	15
Tabel 3. 3. Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2022.....	17
Tabel 3. 4. Capaian Kinerja Program Tahun 2022 .....	17
Tabel 3. 5. Hasil Survey Tingkat Kepuasan Layanan Pusat Data Dan Informasi Pangan	18
Tabel 3. 6. Nilai Kinerja Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2022.....	22
Tabel 3. 7. Capaian Kinerja Kegiatan 6 dan 7 .....	23
Tabel 3. 8. Hasil Survey Tingkat Kepuasan Layanan Manajemen Ketatausahaan Pusat Data Dan Informasi Pangan.....	24
Tabel 3. 9. Capaian Kinerja Kegiatan 8 dan 9 .....	25
Tabel 3. 10. Capaian Kinerja Kegiatan 10 - 12.....	29
Tabel 3. 11. Capaian Kinerja Kegiatan 13.....	32
Tabel 3. 12. Rekapitulasi Penilaian Mandiri RB Badan Pangan Nasional Tahun 2022.....	33
Tabel 3. 13. Capaian Kinerja Kegiatan 14 - 16.....	34
Tabel 3. 14. Nilai Kinerja Anggaran Badan Pangan Nasional TA. 2022 .....	36
Tabel 3. 15. Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional TA. 2022.....	37
Tabel 3. 16. Realisasi Anggaran Sekretariat Utama Tahun 2022.....	39



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Utama .....	5
Gambar 2. 1. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.....	7
Gambar 3. 1. Nilai NKA Lingkup Kementerian Pertanian TA. 2022 .....	21

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 yang terbit pada Tanggal 29 Juli 2021, terjadi transisi organisasi dari Badan Ketahanan Pangan yang sebelumnya merupakan Eselon I Kementerian Pertanian bertransformasi menjadi Badan Pangan Nasional. Organisasi Badan Pangan Nasional terdiri Kepala Badan dan 4 (Empat) Eselon I yaitu: 1). Sekretariat Utama; 2). Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan; 3). Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi; dan 4). Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Pada Tanggal 21 Februari 2022 Presiden melantik Kepala Badan Pangan Nasional, Selanjutnya pada tanggal 31 Juni 2022 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilantik oleh Kepala Badan Pangan Nasional, sehingga secara resmi Organisasi Badan Pangan Nasional sudah lengkap dan melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Utama sebagai salah satu unit Eselon I di Badan Pangan Nasional telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024 sebagai landasan pelaksanaan kegiatan jangka menengah. Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan Renstra Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024. Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional adalah Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Pangan Nasional yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan di Tahun 2022 merupakan kegiatan yang bersifat manajerial dan layanan operasional perkantoran di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengimplementasikan semangat reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan, melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan



sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*output*). SAKIP diimplementasikan oleh Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional, yaitu mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan instrumen utama dalam melaksanakan pembaharuan birokrasi Pemerintah, untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen yang kuat dari pejabat dan semua pegawai lingkup Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.

Penerapan SAKIP mengacu pada: (1) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), (4) Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (menggantikan Permenpan RB No 29 Tahun 2010), dan 5) Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan kinerja Sekretariat Utama Badan Nasional hanya mencakup kegiatan manajemen di tingkat Pusat. Dalam pencapaian sasaran program Tahun 2022, terdapat beberapa kendala utama yaitu : 1). Unit kerja baru dengan struktur pimpinan dan staf yang baru berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi; 2). Perubahan kebijakan yang berdampak pada perubahan anggaran dan sasaran; 3). Pelaksanaan monitoring dan pelaporan program ketahanan pangan kurang optimal karena singkatnya waktu pelaksanaan kegiatan; 4). Belum adanya regulasi perpanjangan kewenangan ke Dinas Teknis yang menangani urusan Pangan di daerah; (5) Hasil analisis ketahanan pangan belum

dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program; dan 6). Pencairan dana terlambat sehingga pelaksanaan kegiatan belum maksimal.

Melihat permasalahan utama pada kegiatan manajemen ketahanan pangan diatas, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional sebagai pengelola manajemen pembangunan ketahanan pangan pada Badan Pangan Nasional, dituntut untuk mampu mewujudkan akuntabilitasnya dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Akuntabilitas dapat dilihat melalui kompetensi, sinergitas, dan kinerja yang dihasilkan lembaga. Sejalan dengan adanya perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didukung dengan penegakan hukum dan transparansi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengukuran kinerja dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022, yang telah disesuaikan dengan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Di samping itu LKj Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance*, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional tahun 2022 disusun sebagai pertanggungjawaban Kinerja Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Tujuan penyusunan LKj ini adalah untuk melaporkan capaian kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

### 1.3. Organisasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional

#### 1.3.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional merupakan unit kerja Eselon I pada instansi Badan Pangan Nasional. Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional memiliki tugas **“menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional”**.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Pangan Nasional;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

#### 1.3.2. Struktur Organisasi

Sebagai unit kerja Eselon I, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara operasional dilaksanakan oleh 3 Biro yaitu Biro Perencanaan, Kerja sama dan Hubungan Masyarakat, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum serta Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum.

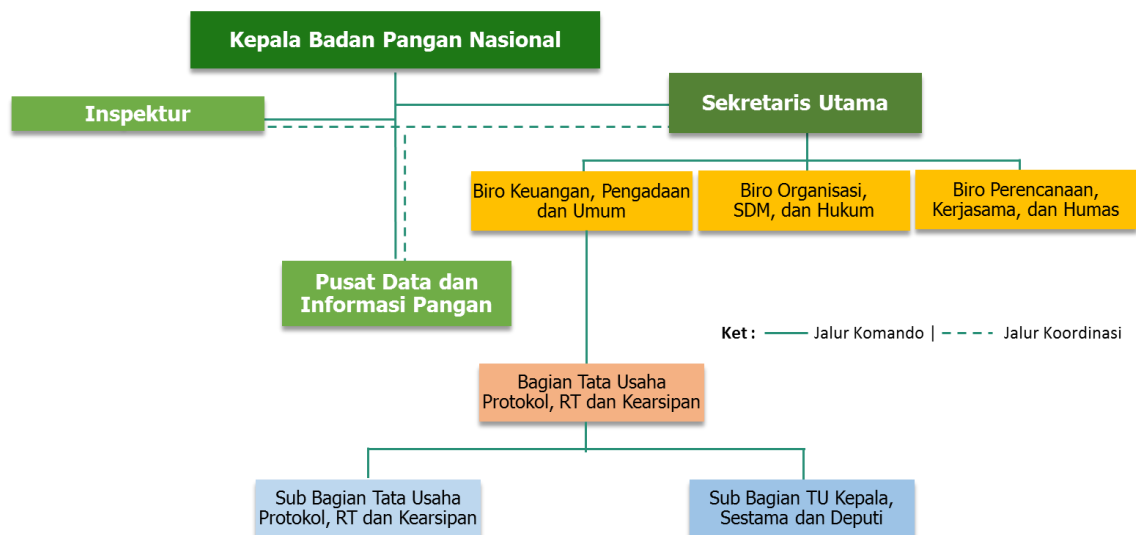
Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum terdiri atas Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol, dan Rumah Tangga serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol, dan Rumah Tangga terdiri atas :

- a. Subbagian Protokol, Rumah Tangga, dan Kearsipan;
- b. Subbagian Tata Usaha Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
- e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selain itu, dalam Struktur Organisasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional, Inspektorat dan Pusat Data dan Informasi Pangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional. Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Data dan Informasi Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. Pusat Data dan Informasi Pangan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Secara rinci struktur organisasi Sekretariat Utama dapat dilihat pada gambar 1.1. sebagai berikut:

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Sekretariat Utama



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Kebijakan pangan yang dijalankan kedepan akan sangat menentukan kemampuan Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional telah menyiapkan kebijakan dan program untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan selama periode 3 (tiga) tahun yang dituangkan dalam Renstra Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024. Renstra tersebut sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan lingkup Sekretariat Utama sehingga dapat lebih terarah, efektif, dan efisien untuk pencapaian visi dan misi Badan Pangan Nasional periode tahun 2022 - 2024.

### 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Badan Pangan Nasional telah menetapkan visi sesuai Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yakni:

**“Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”**

Yang akan dilaksanakan melalui misi:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

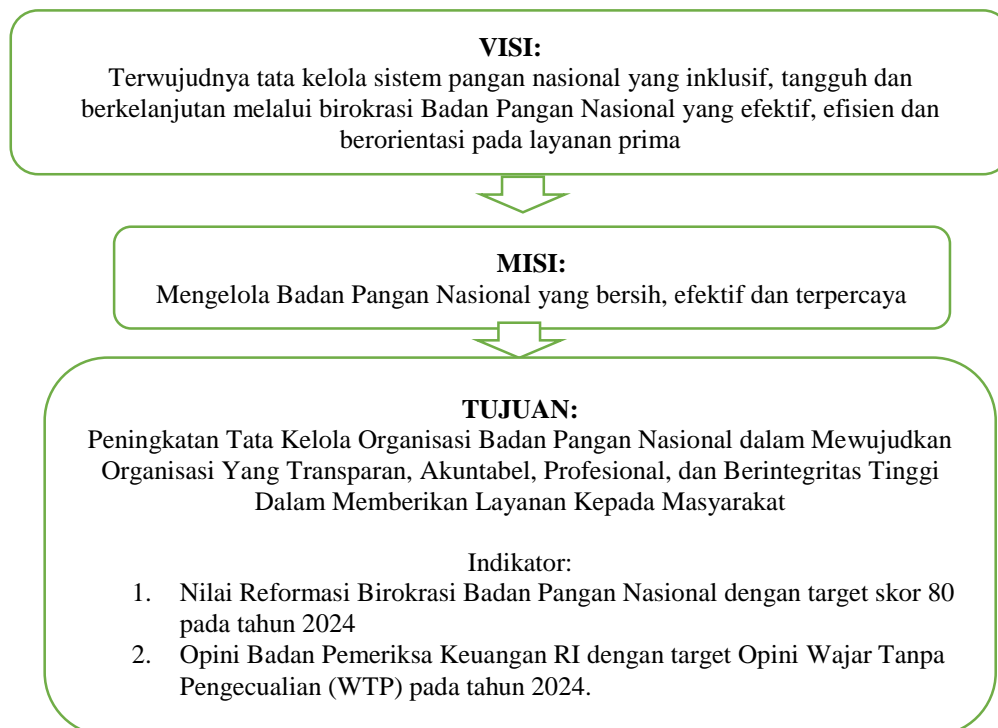
Tujuan Badan Pangan Nasional sesuai Visi dan Misi diatas, adalah:

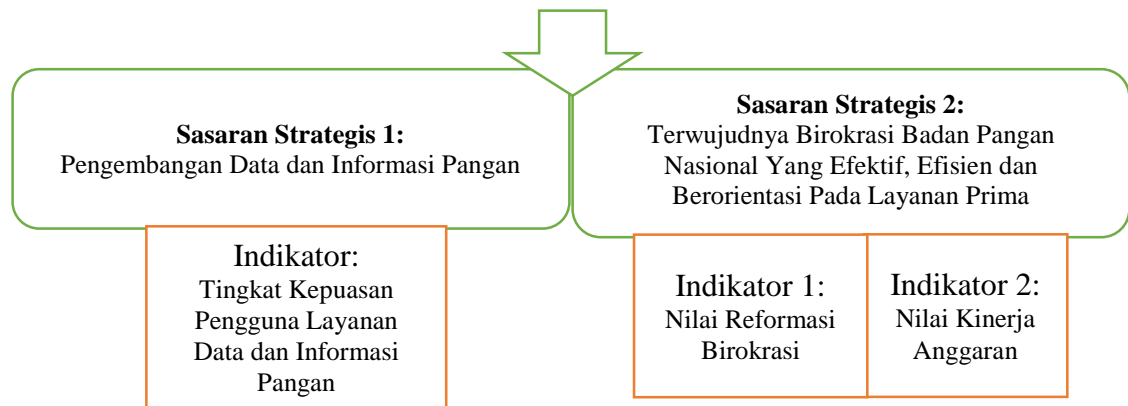
1. Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan, dengan indikator:
  - 1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 95,2 pada tahun 2024.

- 2) *Global Food Security Index (GFSI)* dengan target skor 69,8% pada tahun 2024.
  - 3) Inflasi Pangan Bergejolak dengan target  $4,0 \pm 1$  % pada tahun 2024.
  - 4) *Food Insecutiry Experience Scale/FIES* (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target skor 4,0 pada tahun 2024.
2. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dengan indikator:
- 1) Nilai Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional dengan target skor 80 pada tahun 2024.
  - 2) Opini BPK RI dengan target WTP pada tahun 2024.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi akan berpedoman pada Renstra Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024 dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Gambar 2. 1. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional





Masing - masing tujuan dan sasaran strategis tersebut memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaian setiap indikator. Indikator beserta target kinerja tertuang pada Renstra Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024 sebagaimana tabel 2.1. berikut:

Tabel 2. 1. Target Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET		
				2022	2023	2024
SS.6	Pengembangan Data dan Informasi Pangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Pangan	Indeks	3,0	3,25	3,5
SS.7	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	76	78	80
		Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	85	87,5	90

Untuk memudahkan pemetaan Sasaran Strategis maka digunakan alat bantu *Balance Scorecard*. Dalam konsep *Balance Scorecard* Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) telah diformulasikan dari visi dan misi serta didefinisikan sebagai pernyataan yang ingin dicapai pada level *output* atau *outcome*, apa yang ingin dilakukan pada level proses, dan apa yang seharusnya kita miliki pada level input. Sebagaimana peta strategis Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama berada pada pemetaan:

- Perspektif *Internal Business Process*  
Sasaran Strategi 6. Pengembangan Data dan Informasi Pangan. Merupakan serangkaian aktifitas yang digunakan untuk menciptakan produk/jasa dalam rangka memenuhi harapan pemanfaatan layanan dan *stakeholder* atas produk dan atau jasa yang dihasilkan oleh Pusat Data dan Informasi Pangan yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional
- Perspektif *Learning and Growth*  
Sasaran Strategis 7. Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional Yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima. Merupakan perspektif yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi.

## 2.2. Arah Kebijakan, Strategi dan Program

Arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan; dan aspek pendukung lainnya. Arah kebijakan Sekretariat Utama akan fokus pada aspek pendukung, dilakukan melalui:

- SS6: Pengembangan Data dan Informasi Pangan, dengan strategi:
  - 1) Integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis;
  - 2) *Platform* pangan berbasis *data driven*;
  - 3) Pemanfaatan sistem informasi iklim untuk pengamanan ketersediaan pangan.
- SS7: Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan strategi:
  - 1) Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokrasi, deregulasi dan digitalisasi;
  - 2) Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.



Strategi di atas kemudian diturunkan menjadi sasaran strategis beserta indikatornya. Sekretariat Utama melaksanakan Program Dukungan Manajemen untuk memberikan dukungan manajerial dan layanan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis serta memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik di lingkungan Badan Pangan Nasional. Selanjutnya Sasaran Strategis dijabarkan dalam sasaran program dan indikatornya yang diturunkan menjadi sasaran kegiatan beserta indikatornya yang pencapaiannya menjadi tanggungjawab masing-masing eselon II di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.

### 2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU Sekretariat Utama sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024. IKU tersebut diturunkan ke dalam IKU unit kerja eselon II. Karena itu setiap unit kerja eselon II mempunyai kontribusi dalam pencapaian target kinerja Sekretariat Utama. Peran unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Utama sebagaimana tabel 2.2. berikut:

Tabel 2. 2. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Capaian Kinerja Sekretariat Utama

Tujuan/Sasaran/Indikator	Biro PKH	Biro OSDMH	Biro KPU	Inspektorat	Pusdatin
<b>Tujuan 2:</b> Peningkatan Tata Kelola Organisasi Badan Pangan Nasional dalam Mewujudkan Organisasi Yang Transparan, Akuntabel, Profesional, dan Berintegrasi Tinggi Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat					
<b>Sasaran Program 6:</b> Pengembangan Data dan Informasi Pangan					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Pangan</li> </ul>					*
<b>Sasaran Program 7:</b> Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Reformasi Birokrasi</li> </ul>	*	*	*	*	*
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Kinerja Anggaran</li> </ul>	*	*	*	*	*

Ket:  : Koordinator | \* : Pendukung

Dari tabel di atas terlihat peran dan kontribusi masing-masing unit Eselon II Sekretariat Utama terhadap Sasaran Tujuan 2 Badan Pangan Nasional.

#### 2.4. Pagu Anggaran

Dari sisi anggaran, untuk mencapai kinerja yang ditargetkan, Sekretariat Utama pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar **Rp90.279.388.000,-** (Sembilan puluh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Pagu anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, kegiatan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional dengan alokasi per unit kerja eselon II dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut:

Tabel 2. 3. Pagu Anggaran Sekretariat Utama Tahun 2022 Menurut Unit Kerja

Unit Kerja		Pagu (Rupiah)	%
1.	Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas	20.808.346.000	23,05
2.	Biro Organisasi, SDM dan Hukum	7.861.404.000	8,71
3.	Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum	56.013.458.000	62,04
4.	Inspektorat	2.300.000.000	2,55
5.	Pusat Data dan Informasi Pangan	3.296.180.000	3,65
<b>TOTAL</b>		<b>90.279.388.000</b>	<b>100,00</b>

Dari tabel diatas, Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum mendapat alokasi pagu terbesar yaitu Rp56.013.458.000,- alokasi tersebut sudah termasuk komponen Gaji Pegawai dan Operasional Kantor. Selanjutnya Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas Rp.20.712.346.000,- yang sebagian besar alokasinya diperuntukkan bagi penyiapan dokumen perencanaan dan anggaran Badan Pangan Nasional untuk dapat beroperasi secara mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum dengan alokasi Rp.7.861.404.000,- yang diperuntukkan bagi penyiapan organisasi Badan Pangan Nasional beserta perangkatnya serta penyiapan regulasi sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional. Sementara alokasi anggaran paling kecil pada Inspektorat untuk mempersiapkan SDM dan perangkatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

## 2.5. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sebagai acuan/tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang merupakan perjanjian kinerja dan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022. Dalam PK termasuk alokasi anggaran per unit kerja sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Tahun 2022. PK Sekretaris Utama Tahun 2022 sebagaimana tabel 2.4. berikut:

Tabel 2. 4. Perjanjian Kinerja dan Pagu Anggaran Sekretaris Utama Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu (Rupiah)
<b>Sasaran Program 6:</b>				
Pengembangan Data dan Informasi Pangan				
IKSP. 19	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Pangan	Indeks	3,0	3.296.180.000
<b>Sasaran Program 7:</b>				
Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional Yang Efektif, Efisiensi dan Berorientasi Pada Layanan Prima				
IKSP. 20	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	76	7.861.404.000
				2.300.000.000
IKSP. 21	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	85	20.808.346.000
				56.013.458.000
<b>TOTAL</b>				<b>90.279.388.000</b>

Indikator kinerja sasaran program sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan dengan dukungan alokasi anggaran berdasarkan unit kerja.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 berdasarkan target Renstra Sekretariat Utama Tahun 2022-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, perhitungannya menggunakan metode membandingkan antara realisasi indikator dengan target indikator pada tahun berjalan. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

1. Sangat Baik : Jika capaian kinerja  $\geq 90\%$
2. Baik :  $> 80\% - 90\%$
3. Cukup Baik :  $> 60\% - 80\%$
4. Kurang Baik :  $> 50\% - 60\%$
5. Sangat Kurang Baik :  $\leq 50\%$

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan dua pendekatan yaitu *maximize target* dan *minimize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan yang dimaksud dengan *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Adapun Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional untuk *maximize* dan *minimize target* adalah sebagai berikut :

$$\textit{Maximize target} : \text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\textit{Minimize target} : \text{Indeks Capaian IKU} = \left[ 1 + \left( 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 diukur dengan pendekatan *maximize target* secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1.

### 3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan

Sekretariat Utama akan mendukung kinerja organisasi dengan *cascading* langsung dari tujuan 2, yaitu: Peningkatan Tata Kelola Organisasi Badan Pangan Nasional Dalam Mewujudkan Organisasi Yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat. Capaian kinerja tujuan 2 sebagaimana tabel 3.1. berikut:

Tabel 3. 1. Capaian Kinerja Pada Tujuan 2 Tahun 2022

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Tujuan 2:</b> Peningkatan Tata Kelola Organisasi Badan Pangan Nasional Dalam Mewujudkan Organisasi Yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat					
1	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	76	80,00	105,22 (Sangat Baik)
2	Opini BPK RI	Predikat	WTP	WTP	100,00 (Sangat Baik)
<b>Capaian Kinerja Sasaran Tujuan</b>					<b>102,61 (Sangat Baik)</b>

Pencapaian kinerja tujuan 2, merupakan kontribusi Sekretariat Utama untuk pencapaian kinerja organisasi dengan mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu Sekretariat Utama dituntut untuk memperkuat kelembagaan dengan penyiapan regulasi, kebijakan serta penyediaan infrastruktur kelembagaan Badan Pangan Nasional.

Hasil capaian indikator kinerja tujuan 2 telah memenuhi target dengan capaian nilai reformasi birokrasi mencapai 105,22%. Nilai reformasi birokrasi diukur dengan menggunakan lembar kerja evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Nilai Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pangan

Nasional Tahun 2022 mendapatkan nilai sebesar 80. Dari 2 (dua) unsur yang dinilai, hasil penilaian evaluasi menghasilkan nilai: 1). Pengungkit sebesar 42,00; dan 2). Hasil sebesar 38. Secara lengkap hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Pangan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut:

Tabel 3. 2. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Tahun 2022

Penilaian		Bobot	Target	Capaian
<b>A.</b>	<b>PENGUNGKIT</b>	<b>60,00</b>	<b>38,00</b>	<b>42,00</b>
	<b>I. PEMENUHAN (20)</b>	<b>20,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,50</b>
	1   Manajemen Perubahan	2,00	2,00	2,00
	2   Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	2,00
	3   Penataan Dan Penguatan Organisasi	3,00	2,00	2,00
	4   Penataan Tatalaksana	2,50	2,50	2,50
	5   Penataan Sistem Manajemen Sdm	3,00	1,50	2,00
	6   Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	2,50
	7   Penguatan Pengawasan	2,50	2,00	2,00
	8   Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,50	2,50
	<b>II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)</b>	<b>10,00</b>	<b>8,00</b>	<b>9,00</b>
	1   Kualitas Pengelolaan Arsip	1,00	1,00	1,00
	2   Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,00	1,00	1,00
	3   Kualitas Pengelolaan Keuangan	1,00	1,00	1,00
	4   Kualitas Pengelolaan Aset	1,00	0	1,00
	5   Merit System	1,00	0	0
	6   ASN Profesional	1,00	1,00	1,00
	7   Kualitas Perencanaan	1,00	1,00	1,00
	8   Maturitas SPIP	1,00	1,00	1,00
	9   Kapabilitas APIP	1,00	1,00	1,00
	10   Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai UU 25 Tahun 2009	1,00	1,00	1,00
	<b>III. REFORM (30)</b>	<b>30,00</b>	<b>13,00</b>	<b>15,50</b>
	1   Manajemen Perubahan	3,00	2,00	2,00
	2   Deregulasi Kebijakan	3,00	0,80	1,00
	3   Penataan Dan Penguatan Organisasi	4,50	1,30	2,00
	4   Penataan Tatalaksana	3,75	2,00	2,00
	5   Penataan Sistem Manajemen Sdm	4,50	1,00	2,00
	6   Penguatan Akuntabilitas	3,75	2,50	2,50
	7   Penguatan Pengawasan	3,75	1,00	1,00
	8   Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	2,40	3,00

Penilaian				Bobot	Target	Capaian
<b>B.</b>	<b>HASIL</b>			<b>40</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
	<b>1</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10)</b>		<b>10,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
		i.	Opini BPK (3)	3,00	3,00	3,00
		ii.	Nilai SAKIP (7)	7,00	5,00	5,00
	<b>2</b>	<b>KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)		10,00	10,00	10,00
	<b>3</b>	<b>PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)		10,00	10,00	10,00
	<b>4</b>	<b>KINERJA ORGANISASI (10)</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
		i.	Capaian Kinerja	5,00	5,00	5,00
		ii.	Kinerja Lainnya	2,00	2,00	2,00
		iii.	Survei Internal Organisasi	3,00	3,00	3,00
<b>NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI</b>				<b>100</b>	<b>76</b>	<b>80</b>

Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) didapat dari Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L). Opini BPK RI Badan Pangan Nasional pada capaian kinerja ini masih menggunakan Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2021, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 9b/LHP/XVII/05/2022. Adapun pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2022 belum terbit sehingga masih menggunakan opini BPK pada Kementerian Pertanian dimana Badan Ketahanan Pangan sebagai embrio Badan Pangan Nasional dengan predikat WTP sehingga indikator ini mencapai 100%. Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian dapat dilihat pada lampiran 1.

### 3.1.2. Capaian Kinerja Program

Sekretariat Utama akan melaksanakan Program Dukungan Manajemen dengan sasaran dan indikatornya akan dicapai dengan *maximize target*, dengan cara perhitungan pada tabel 3.3. berikut:

Tabel 3. 3. Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Keterangan
1	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	Indeks	3,0	Semakin besar tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan, maka kualitas layanan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional semakin meningkat.
2	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	76	Semakin besar realisasi Nilai Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB) berdasarkan penilaian Inspektorat Badan Pangan Nasional maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional semakin baik.
3	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	85	Semakin besar realisasi Nilai Kinerja Anggaran, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional semakin baik.

Sejalan dengan dinamika perencanaan Tahun 2022 diikuti penyesuaian atas dokumen perencanaan dan dokumen anggaran. Proses tersebut telah melalui tahapan reuiu, revisi dan pembaharuan dokumen. Dinamika tersebut berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan. Dilakukannya revisi anggaran ditujukan untuk *refocusing* kegiatan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran program Sekretariat Utama Tahun 2022. Pada periode ini, Badan Pangan Nasional masih menggunakan Bagian Anggaran (BA) 018 Kementerian Pertanian.

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran program dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran program dengan realisasinya pada tahun 2022. Capaian masing-masing indikator kinerja sasaran program selengkapnya pada tabel 3.4. berikut:

Tabel 3. 4. Capaian Kinerja Program Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Sasaran Program 6:</b> Pengembangan Data dan Informasi Pangan	1 Tingkat kepuasan pengguna layanan data	Skala Likert (1-4)	3,00	3,10	103,33 (Sangat Baik)



		dan informasi pangan				
<b>Sasaran Program 7:</b> Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	2	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	76,00	80,00	105,26 (Sangat Baik)
	3	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	85,00	92,29	108,58 (Sangat Baik)
<b>Capaian Kinerja Sasaran Program</b>						<b>105,72 (Sangat Baik)</b>

Capaian indikator kinerja sasaran program dari ketiga indikator telah mencapai target atau capaian diatas 100%. Artinya pencapaian sasaran program Sekretariat Utama sangat baik.

Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi didapat dengan hasil survey kepada pengguna layanan data dan informasi pangan di lingkup Badan Pangan Nasional. pangan dengan capaian 103,33%, artinya *stakeholder* yang menjadi pengguna layanan data dan informasi pangan menyatakan puas atas kinerja tahun 2022. Survey tersebut menggunakan metode Skala Likert yaitu 4 Tingkat Kepuasan dengan 8 Jenis Pelayanan. Dari hasil survei layanan tersebut, tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan secara umum mencapai 3,10 skala likert. Secara rinci perhitungan hasil survey tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut:

Tabel 3. 5. Hasil Survey Tingkat Kepuasan Layanan Pusat Data Dan Informasi Pangan

No	Rincian Pelayanan	Tingkat kepuasan			
		1	2	3	4
1	Kejelasan prosedur dalam pengajuan layanan	0	2	18	6
2	Kemudahan pengajuan persyaratan layanan	1	3	17	5
3	Petugas pelayanan merespon dengan baik untuk setiap pengajuan pelayanan	1	1	16	8
4	Petugas pelayanan mampu memberikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami	1	4	16	5

No	Rincian Pelayanan	Tingkat kepuasan			
		1	2	3	4
5	Keramahan dan kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan	1	1	15	9
6	Jangka waktu penyelesaian layanan sesuai dengan yang ditetapkan	2	2	17	5
7	Hasil layanan sesuai dengan yang diharapkan	0	4	13	9
8	Proses penanganan terhadap pengaduan dan keluhan cepat ditindaklanjuti oleh petugas	1	1	19	5

Metode penghitungan hasil survey adalah :

- Total Responden = Jumlah responden per skala (T)
- Total Penilaian Responden =  
Rumus =  $T \times P_n$   
T = Total jumlah responden  
P<sub>n</sub> = Pilihan angka skala Linkert
- Total Penilaian Responden = Hasil Akhir Skala = Total Penilaian Responden/Total Responden

Walaupun indikator Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan telah melebihi target, akan tetapi masih banyak Upaya yang akan/telah dilakukan dalam rangka Pengembangan Data dan Informasi Pangan, diantaranya:

1. Integrasi Data Lintas dengan K/L dan Pemerintah Daerah melalui *Application Program Interface* (API).
2. Transmission Data Collection untuk wilayah/daerah blank spot di 10 wilayah.
3. Upgrade Layanan Intranet E-Office (TNDE, TTE dll).
4. Perencanaan dan Pembangunan Pusat Kendali TI, termasuk manajemen Office IT.
5. Rancangan dan Pengembangan Sistem Informasi, termasuk pemantapan SPBE.
6. Web Application firewall.
7. Penguatan Data Scientist dan Ahli Jaringan komputer.

8. Penyempurnaan Layanan Publik Data dan Informasi (Helpdesk).
9. Peningkatan kesiapsiagaan pegawai dalam pendampingan dan pengawalan pelaksanaan sistem jaringan Badan Pangan Nasional.
10. Peningkatan kuantitas pegawai melalui CPNS, P3K, maupun penerimaan mutasi.
11. Peningkatan kualitas pegawai melalui keikutsertaan dalam workshop/pelatihan bidang analisis, sistem keamanan jaringan dan data.
12. Peningkatan dan optimalisasi dukungan anggaran.

Indikator Nilai Reformasi diturunkan secara langsung (*cascade*) dari indikator tujuan Badan Pangan Nasional. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional diperoleh dari hasil penilaian mandiri atas instrument pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2022. Metode perhitungan sesuai PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, capaian kinerja RB. Dari hasil penilaian mandiri atas instrument pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pangan Nasional didapatkan nilai sebesar 80 atau 105,26% dari target yang ditetapkan.

Pada dasarnya untuk hasil penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pangan Nasional tahun 2022 sudah cukup baik, hanya perlu penyesuaian dengan sistem kerja yang baru. Sebenarnya capaian reformasi birokrasi di area penataan SDM masih bisa ditingkatkan apabila ketersediaan SDM dan anggaran memadai. Sebagai contoh, pelaksanaan pelayanan yang terkait dengan pengembangan kompetensi SDM ini tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena dengan jumlah SDM yang terbatas tidak memungkinkan untuk memberikan beasiswa kepada pegawai.

Kedepannya pengembangan kompetensi SDM akan menggunakan metode merdeka belajar. Sehingga pegawai bisa mengembangkan kompetensinya, namun kinerja organisasi tidak lagi terganggu. Sudah ada 3 (tiga) universitas yang memberikan penawaran untuk kerjasama dalam pendidikan dengan mekanisme/metode MERDEKA BELAJAR ini yaitu (IPB, Unibraw dan UGM).

Sebagai lembaga baru, keterbatasan sumberdaya menjadi kendala yang cukup signifikan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pangan, akan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Tugas ini harusnya diimbangi dengan sumberdaya yang memadai untuk pelaksanaannya. Seperti gedung, prasarana dan sarana. Apabila semua sumberdaya yang di perlukan dalam pelayanan publik itu dapat di penuhi, bisa dipastikan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional akan bisa lebih baik dari pada saat ini.

Indikator Nilai kinerja anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2022 diperoleh dari hasil evaluasi kinerja anggaran melalui proses pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran pada tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya, Hasil evaluasi untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Evaluasi ini sebagai salah satu instrument penerapan penganggaran berbasis kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat diakses melalui Aplikasi Monev Anggaran (SMART).

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang digunakan adalah NKA Badan Ketahanan Pangan Tahun 2022. Hasil penilaian didapatkan NKA Badan Pangan Nasional sebesar 92,29 atau 108,58% dari tabel yang ditetapkan. Nilai NKA Badan Ketahanan Pangan TA. 2022 dapat dilihat pada gambar 3.1. berikut:

Gambar 3. 1. Nilai NKA Lingkup Kementerian Pertanian TA. 2022

No.	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CRP	Efisiensi	Nilai Efektif	Rata Rata Satker
1	Sekretariat Jenderal	91,08	100,00	99,08	83,35	97,92	-1,15	47,125	88,53
2	Inspektorat Jenderal	93,55	100,00	97,45	99,50	100,00	11,68	79,2	89,20
3	Ditjen Tanaman Pangan	88,97	100,00	97,61	87,17	99,38	1,25	53,125	83,34
4	Ditjen Hortikultura	86,00	100,00	98,07	64,86	100,00	-9,31	26,725	81,20
5	Ditjen Perkebunan	91,04	100,00	97,04	87,65	100,00	-3,11	42,225	88,43
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	90,51	100,00	88,94	79,36	100,00	15,32	88,3	83,74
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	89,05	100,00	96,17	62,49	100,00	1,66	54,15	84,86
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	83,26	100,00	95,25	95,71	10,16	-20,00	0	89,48
9	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	90,63	100,00	98,81	96,51	100,00	7,12	67,8	84,57
10	Badan Ketahanan Pangan	92,29	97,71	87,08	98,29	100,00	13,25	83,125	88,23
11	Badan Karantina Pertanian	94,59	100,00	99,55	98,74	100,00	7,90	69,75	92,16

Secara rinci hasil penilaian NKA Badan Pangan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.6. berikut:

Tabel 3. 6. Nilai Kinerja Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2022

No.	Indikator	Nilai
1	Capaian Sasaran Program	97,71
2	Penyerapan Anggaran	87,08
3	Konsistensi	98,29
4	Capaian Kinerja Program	100,00
5	Efisiensi	13,25
6	Nilai Efisiensi	83,12
<b>NKA</b>		92,29

Dari tabel di atas dapat terlihat nilai penyerapan anggaran mendapat nilai yang paling kecil diantara nilai lainnya. Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang sudah dan akan dilakukan agar nilai kinerja anggaran Badan Pangan Nasional bisa lebih optimal diantaranya:

1. Mempercepat realisasi kegiatan dan anggaran di awal tahun berjalan;
2. reviu terhadap Renstra Badan Pangan Nasional agar Indikator Kinerja Utama dapat terukur secara jelas;
3. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan;
4. Melakukan pemantauan, evalausi dan pelaporan secara berkesinambungan.

Capaian kinerja Sekretariat Utama dihitung dari rata-rata capaian dari indikator sasaran program yang diampu oleh Sekretariat Utama. Dari pencapaian ketiga indikator kinerja program sesuai tabel 3.3. di atas didapatkan rata-rata capaian kinerja Sekretariat Utama sebesar 105,72% artinya pencapaian kinerja Sekretariat Utama Sangat Baik.

### 3.1.3. Capaian Kinerja Kegiatan

Pencapaian kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional Tahun 2022 akan dicapai melalui indikator kinerja sasaran kegiatan yang di *cascading* ke unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Badan, dengan capaian masing-masing unit kerja sebagai berikut:

### ➤ Pengelolaan Data dan Informasi Pangan

Dalam rangka pengelolaan data dan informasi pangan yang menjadi tanggungjawab Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan sebagaimana perjanjian kinerja tahun 2022 yang telah disepakati dengan Plt. Sekretaris Utama dan diketahui Kepala Badan Pangan Nasional, capaian kinerja untuk 3 (tiga) indikator yang menjadi tanggungjawab Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan seluruhnya dengan capaian diatas 100%. Penjelasan atas capaian indikator tersebut sebagaimana tabel 3.7. berikut:

Tabel 3. 7. Capaian Kinerja Kegiatan 6 dan 7

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Sasaran Kegiatan 6:</b> Meningkatnya Pengelola Data dan Informasi Pangan	1 Jumlah aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi pangan nasional	Jumlah Aplikasi	18,00	19,00	105,55 (Sangat Baik)
	2 Tingkat Kepuasan layanan pusat Data dan Sistem Informasi Pangan	Skala Likert (1-4)	3,10	3,10	100,00 (Sangat Baik)
<b>Sasaran Kegiatan 7:</b> Terwujudnya Pengelola Manajemen Ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Pangan yang efektif, efisien dan akuntabel	3 Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,11	103,67 (Sangat Baik)

Tahun 2022, banyak aplikasi baru yang telah terbentuk maupun pengembangan dari aplikasi lama, namun belum seluruhnya terintegrasi atau di-link-kan. Untuk itu diperlukan satu wadah berupa *dashboard* yang mudah dilihat dan diakses yang dikelola oleh Pusdatin Pangan.

Penghitungan capaian kinerja jenis aplikasi yang telah terintegrasi/di-link-kan adalah membandingkan antara target dengan realisasi. Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, jumlah aplikasi yang terintegrasi atau di-link-kan ke dalam *Dashboard* Satu Data Pangan mencapai 19 aplikasi atau capaian kinerja 105,55%, seperti yang tertuang pada lampiran 2. Alamat website Integrasi Satu Data Pangan dapat diakses pada

laman [portalsatudata.badanpangan.go.id](https://portalsatudata.badanpangan.go.id) di masa peralihan masih menggunakan domain <https://dashboardpangan.caffelum.xyz>

Tingkat Kepuasan layanan pusat Data dan Sistem Informasi Pangan informasi didapat dengan hasil survey kepada pengguna layanan data dan informasi pangan di lingkup Badan Pangan Nasional. pangan dengan capaian 100%, artinya *stakeholder* yang menjadi pengguna layanan data dan informasi pangan menyatakan puas atas kinerja tahun 2022. Survey dan perhitungan menggunakan metode yang sama dengan survey Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi.

Dalam struktur Organisasi Badan Pangan Nasional pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Informasi Pangan didukung oleh Sub Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Pangan. Tugas pokok Kepala Sub Tata Usaha yaitu melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusdatin Pangan antara lain: penyusunan rencana, program, dan anggaran; pelaksanaan urusan tata usaha Pusdatin Pangan; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. Guna mengetahui Tingkat Kepuasan Layanan Manajemen Ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Pangan dilakukan sensus terhadap seluruh pegawai yang berada di unit Pusat Data dan Informasi Pangan. Hasil sensus tingkat kepuasan pegawai Pusdatin Pangan seperti tertera pada tabel 3.8. di bawah ini:

Tabel 3. 8. Hasil Survey Tingkat Kepuasan Layanan Manajemen Ketatausahaan Pusat Data Dan Informasi Pangan

No	Rincian Pelayanan	Tingkat kepuasan			
		1	2	3	4
1	Penyusunan rencana program dan anggaran	0	1	5	3
2	Informasi dan dokumen Kepegawaian	0	2	2	5
3	Penyelesaian dan kearsipan dokumen Keuangan	0	2	7	1
4	Kebutuhan Sarana dan Prasarana	0	5	1	3
5	Penyelesaian Persuratan dan Kerasipan	0	1	6	2

No	Rincian Pelayanan	Tingkat kepuasan			
		1	2	3	4
6	Kesiagaan melaksanakan penugasan dari pimpinan	0	1	5	3

Berdasarkan data di atas, tingkat kepuasan Pegawai Pusdatin Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan mencapai 3,11 skala likert atau capaian kinerja 103,67% dari target sebesar 3,00 skala likert. Metode penghitungan hasil survey sebagai berikut:

Metode penghitungan hasil survey adalah :

- Total Responden = Jumlah responden per skala (T)
- Total Penilaian Responden =  
Rumus =  $T \times P_n$   
T = Total jumlah responden  
P<sub>n</sub> = Pilihan angka skala Linkert
- Total Penilaian Responden = Hasil Akhir Skala = Total Penilaian Responden/Total Responden
- **Penguatan Pengawasan Internal**

Dalam rangka penguatan pengawasan internal yang menjadi tanggungjawab Inspektur sebagaimana perjanjian kinerja tahun 2022 yang telah disepakati dengan Plt. Sekretaris Utama dan diketahui Kepala Badan Pangan Nasional, capaian kinerja untuk 4 (empat) indikator yang menjadi tanggungjawab Inspektur seluruhnya dengan capaian diatas 100%. Penjelasan atas capaian indikator tersebut sebagaimana tabel. 3.9. di bawah ini:

Tabel 3. 9. Capaian Kinerja Kegiatan 8 dan 9

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Sasaran Kegiatan 8:</b> Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1 Tingkat Maturitas SPIP	Level	3,00	3,89	129,67
	2 Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Level	3,00	3,00	100,00
	3 Tingkat	Skala	3,10	3,43	110,60



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Kepuasan Layanan Inspektorat	Likert (1-4)			
<b>Sasaran Kegiatan 9:</b> Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Pangan yang efektif, efisien dan akuntabel	4 Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,15	105,00

Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional dapat diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu 1) Tingkat Maturitas SPIP; 2) Tingkat Kapabilitas APIP (IACM); 3) Tingkat Kepuasan Layanan Inspektorat sedangkan untuk mengukur terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Inspektorat yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dapat diukur dengan Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat terhadap Layanan Ketatausahaan.

Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP, sebelum bertransformasi menjadi Badan Pangan Nasional, sebagai unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan pengendalian internal dengan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Level maturitas SPIP Badan Ketahanan Pangan di Tahun 2021 3,83 atau terdefinisi. Sebagai lembaga baru yang masih terus melakukan upaya-upaya penyesuaian, level maturitas SPIP pada Tahun 2022 mengadopsi level maturitas SPIP Kementerian Pertanian yakni 3,89. Jika dibandingkan dengan target indikator Tahun 2022 pencapaiannya 129,67 % kategori sangat baik. Berdasarkan hasil tersebut Tingkat Maturitas SPIP Badan Pangan Nasional “terdefinisi” atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Badan Pangan Nasional telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Meskipun telah mencapai target, Badan Pangan Nasional akan terus

berupaya untuk memperkuat lingkungan pengendalian sehingga kedepan Badan Pangan Nasional memiliki capaian level maturitas SPIP secara mandiri.

Pencapaian kinerja Tingkat Kapabilitas APIP (IACM), untuk memberikan *Quality Assurance* atas *Self Assesment* diperlukan penilaian atas kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Internal Audit Capability Model). Seperti halnya tingkat maturitas SPIP, tingkat kapabilitas APIP (IACM) Inspektorat Badan Pangan Nasional masih mengadopsi nilai dari IACM Inspektorat Jenderal Kementerian pertanian. Berdasarkan hasil penilaian, level kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal kementerian Pertanian berada pada level 3 sehingga jika dibandingkan dengan target, level kapabilitas APIP telah mencapai target 100 % dengan kategori sangat berhasil. Level tersebut sejalan dengan arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bahwa sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 Buku II disebutkan pada tahun 2019 kapabilitas APIP harus berada pada level 3 (terintegrasi). Sebagai unit kerja baru Inspektorat Badan Pangan Nasional akan terus melakukan percepatan dalam rangka pencapain level kapabilitas APIP (IACM) secara mandiri sehingga dapat menjadi unit kerja pengawasan internal yang handal dan terpercaya.

Pada indikator tingkat kepuasan layanan inspektorat berdasarkan data yang telah diolah berada pada skala 3,43 dari target 3,1 atau dengan kata lain pencapaiannya 110,6 % atau berkategori sangat berhasil. Sebagai unit kerja yang masih baru pencapaian tersebut tentunya merupakan pencapaian yang perlu diapresiasi dan dijadikan bahan evaluasi bagi Inspektorat Badan Pangan Nasional dalam upayanya sebagai pengawas internal di lingkungan Badan Pangan Nasional. Pada Tahun 2022 Kegiatan pengawasan oleh unit kerja Inspektorat Badan Pangan Nasional masih terbatas pada kegiatan reuiu dan monitoring serta pengawasan lain berdasarkan penugasan pimpinan. Kegiatan audit dan evaluasi belum dapat dilaksanakan karena Bagian Anggaran (BA) yang digunakan masih BA Kementerian

Pertanian (BA-018) sehingga sebagian besar proses pengawasan masih menjadi kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Selain itu dalam beberapa kegiatan karena keterbatasan Auditor, Inspektorat Badan Pangan Nasional melakukan *joint review* dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Jika dijabarkan lebih lanjut tingkat kepuasan 3,43 tersebut terdiri dari 2 (dua) komponen penilaian yaitu komponen penilaian independensi (3,41) dan komponen penilaian profesionalisme (3,44). Berdasarkan angka tersebut komponen penilaian independensi memiliki nilai yang lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai profesionalisme. Untuk penilaian yang sudah bagus agar terus dipertahankan sementara untuk penilaian yang masih kurang harus dijadikan bahan evaluasi oleh unit kerja untuk ditingkatkan performanya. Sebagai upaya untuk terus meningkatkan pelayanan inspektorat, pada Tahun 2023 penambahan jumlah Auditor masih menjadi salah satu fokus, selain itu kelengkapan perangkat pengawasan seperti pedoman dan regulasi akan diselesaikan sehingga kegiatan pengawasan akan dilaksanakan dengan sistem yang lebih terkelola dengan baik. Pengembangan sistem aplikasi pengawasan menjadi rencana jangka panjang Inspektorat Badan Pangan Nasional.

Pencapaian kinerja tingkat kepuasan layanan tata usaha inspektorat, Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, tugas dan fungsi tata usaha Inspektorat Badan Pangan Nasional adalah melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pada pelaksanaannya kegiatan tata usaha meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, kearsipan dan rumah tangga. Besarnya kewenangan yang menjadi tugas dan pekerjaan tata usaha inspektorat diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai serta cermat dalam melaksanakan kegiatan tata usaha di Inspektorat Badan Pangan Nasional. Berdasarkan data yang telah diolah tingkat kepuasan layanan inspektorat mencapai skala 3,15 dengan target layanan kepuasan tata usaha inspektorat adalah 3,00. Artinya layanan tata usaha telah melebihi target yang direncanakan dengan persentase pencapaian 105 % kategori sangat berhasil. Meskipun telah melebihi target, tata usaha inspektorat harus terus berbenah guna

meningkatkan kinerja karena ke depan tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional akan lebih dinamis terutama terkait penambahan jumlah SDM dan juga perluasan kewenangan inspektorat setelah Badan Pangan Nasional memiliki Bagian Anggaran (BA) tersendiri sebagai BA-125 sehingga tugas fungsi pengawasan tidak lagi menjadi ranah Inspektorat Jenderal kementerian Pertanian tetapi sepenuhnya menjadi ranah Inspektorat Badan Pangan Nasional.

➤ **Pengelolaan Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat**

Dalam rangka pengelolaan perencanaan, kerjasama dan hubungan masyarakat yang menjadi tanggungjawab Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana perjanjian kinerja tahun 2022 yang telah disepakati dengan Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, capaian kinerja untuk 4 (empat) indikator yang menjadi tanggungjawab Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat seluruhnya dengan capaian diatas 100%. Penjelasan atas capaian indikator tersebut sebagaimana tabel 3.10. di bawah ini:

Tabel 3. 10. Capaian Kinerja Kegiatan 10 - 12

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran Kegiatan 10:</b> Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	1 Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai	5,00	5,00	100 % (Sangat Baik)
	2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	83,00	85,39	102,88 % (Sangat Baik)
<b>Sasaran Kegiatan 11:</b> Terpenuhinya Layanan Kerjasama Bidang Pangan	3 Persentase Kerjasama Bidang Pangan Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100 % (Sangat Baik)
<b>Sasaran Kegiatan 12:</b> Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima	4 Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik	Skala Likert (1-4)	3,00	3,70	123,33 (Sangat Baik)

Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik, dapat diukur dengan pencapaian kinerja: nilai penguatan akuntabilitas kinerja; dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Capaian nilai penguatan akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk sub-komponen penguatan akuntabilitas di aspek pemenuhan (bobot 2,5%) dan aspek reform (bobot 3,75%). Target pencapaian pada tahun 2022 dengan nilai 5 dan hasil perhitungan mencapai nilai 5 atau 100%. Secara rinci penilaian mandiri atas instrument pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran.

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Badan Pangan Nasional Tahun 2022, sebelum bertransformasi menjadi Badan Pangan Nasional, sebagai unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan telah mendapatkan nilai AKIP tahun 2021 sebesar 85,39. Sebagai lembaga baru yang masih terus melakukan upaya-upaya penyesuaian, nilai AKIP Badan Pangan Nasional pada Tahun 2022 mengadopsi nilai AKIP BKP Kementerian Pertanian tahun 2021 dengan nilai 85,39 atau mencapai 102,88% dari target nilai AKIP Badan Pangan Nasional Tahun 2022 sebesar 83.

Terpenuhinya layanan kerjasama bidang pangan, diukur dengan pencapaian kinerja: persentase kerjasama bidang pangan yang ditindaklanjuti. Capaian persentase kerjasama bidang pangan yang ditindaklanjuti dilakukan melalui fasilitasi *Memorandum of Understanding* (MoU)/Nota Kesepahaman ataupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan stakeholders bidang pangan, kerja sama dalam dan luar negeri serta pelatihan dalam dan luar negeri. Penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah kerjasama (MoU dan PKS) yang ditindaklanjuti melalui program/kegiatan aksi dengan jumlah kerjasama yang disepakati. Pada tahun 2022 terdapat 17 (tujuh belas) kerjasama yang terdiri dari 7 (tujuh) MoU dan 10 (sepuluh) PKS. Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti sebanyak 17 (tujuh belas) kerjasama

dengan capaian 100 %. Jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti dapat dilihat pada lampiran.

Terwujudnya layanan hubungan masyarakat dan informasi publik yang prima, diukur dengan pencapaian kinerja: tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik. Capaian skala tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik dilakukan dengan metode survey ke *stakeholder* terkait penggunaan layanan hubungan masyarakat dan informasi publik yang dilaksanakan Badan Pangan Nasional. Jumlah responden yang menjadi sasaran kuesioner sebanyak 32 responden yang terdiri dari: Internal Badan Pangan Nasional (10 responden), Kementerian/Lembaga (4 responden), Organisasi Perangkat Daerah (3 responden), Pelaku Usaha/Asosiasi/BUMN/BUMD (4 responden), Media (8 responden) dan Lainnya (3 responden). Setiap responden diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari Badan Pangan Nasional terhadap 7 (tujuh) unsur pelayanan yaitu: kemudahan prosedur pengajuan layanan, kedisiplinan petugas dalam memberikan layanan, tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan, petugas layanan merespon dengan baik setiap pengajuan pelayanan, tingkat kepuasan terhadap layanan kehumasan, kecepatan pelayanan, dan keramahan dan kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan. Metode penghitungan hasil survey adalah :

- Total Responden = Jumlah responden per skala (T)
- Total Penilaian Responden =  
Rumus =  $T \times P_n$   
T = Total jumlah responden  
P<sub>n</sub> = Pilihan angka skala Linkert

Total Penilaian Responden = Hasil Akhir Skala = Total Penilaian Responden/Total Responden.

Dari perhitungan hasil survey capaian tingkat kepuasan pengguna layanan hubungan masyarakat mencapai 3,70 atau 123,33% dari target sebesar 3,00 (*skala likert*).

➤ **Pengelolaan Organisasi, SDM dan Pembinaan Hukum Bidang Pangan**

Dalam rangka pengelolaan organisasi, SDM dan Pembinaan Hukum Bidang Pangan yang menjadi tanggungjawab Kepala Biro Organisasi, SDM dan Hukum sebagaimana perjanjian kinerja tahun 2022 yang telah disepakati dengan Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, capaian kinerja untuk 8 (delapan) indikator yang menjadi tanggungjawab Kepala Biro Organisasi, SDM dan Hukum seluruhnya dengan capaian diatas 100%. Penjelasan atas capaian indikator tersebut sebagaimana tabel 3.11. dibawah ini:

Tabel 3. 11. Capaian Kinerja Kegiatan 13

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran Kegiatan 13:</b> Terwujudnya tata kelola Biro Organisasi, SDM dan Hukum Yang Baik	1 Nilai Indeks Manajemen Perubahan	Nilai	4,00	4,00	100,00 (Sangat Baik)
	2 Deregulasi Kebijakan	Nilai	2,80	3,00	107,14 (Sangat Baik)
	3 Nilai Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	3,30	4,00	121,21 (Sangat Baik)
	4 Nilai Indeks Penataan Tata Laksana	Nilai	4,50	4,50	100 (Sangat Baik)
	5 Nilai Indeks Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Nilai	2,50	4,00	160,00 (Sangat Baik)
	6 Nilai Indeks Penguatan Pengawasan	Nilai	3,00	3,00	100,00 (Sangat Baik)
	7 Nilai Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	4,90	5,50	112,40 (Cukup Baik)
	8 Tingkat Kepuasan Layanan Biro	Skala Likert	3,10	3,40	109,00

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Organisasi, SDM dan Hukum	(1-4)			(Sangat Baik)

Terwujudnya Tata Kelola Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum yang Baik, diukur dengan menggunakan lembar kerja evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari unsur pengungkit yang terdiri dari unsur pemenuhan dengan bobot 20% dan unsur reform dengan bobot 30%. Rekapitulasi evaluasi penilaian mandiri unsur pemenuhan dan pengungkit dapat dilihat pada tabel 3.12. berikut:

Tabel 3. 12. Rekapitulasi Penilaian Mandiri RB Badan Pangan Nasional Tahun 2022

No.	Indikator	Nilai Pemenuhan	Nilai Reform	Nilai Total
1	Manajemen Perubahan	2,00	2,00	4,00
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,00	3,00
3	Penataan Dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	4,00
4	Penataan Tatalaksana	2,50	2,00	4,50
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	2,00	4,00
6	Penguatan Pengawasan	2,00	1,00	3,00
7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	3,00	5,50

Secara lengkap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional dapat dilihat pada lampiran.

Tingkat Kepuasan Layanan Biro Organisasi, SDM dan Hukum diukur dengan menggunakan skala likert yang merupakan perhitungan hasil survey yang dilaksanakan kepada pegawai di lingkup Badan Pangan Nasional. Metode penghitungan hasil survey adalah :

- Total Responden = Jumlah responden per skala (T)
- Total Penilaian Responden =  
Rumus =  $T \times P_n$   
T = Total jumlah responden  
P<sub>n</sub> = Pilihan angka skala Linkert



- Total Penilaian Responden = Hasil Akhir Skala = Total Penilaian Responden/Total Responden

Dari perhitungan hasil survey capaian tingkat kepuasan pengguna layanan hubungan masyarakat mencapai 3,40 atau 109,00% dari target sebesar 3,10 (*skala likert*).

- **Pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan Umum**

Dalam rangka pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan Umum yang menjadi tanggungjawab Kepala Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum sebagaimana perjanjian kinerja tahun 2022 yang telah disepakati dengan Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, capaian kinerja untuk 6 (enam) indikator yang menjadi tanggungjawab Kepala Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum seluruhnya dengan capaian diatas 100%. Penjelasan atas capaian indikator tersebut sebagaimana tabel 3.13. di bawah ini:

Tabel 3. 13. Capaian Kinerja Kegiatan 14 - 16

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran Kegiatan 14:</b> Terwujudnya tata kelola Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum yang baik	1 Opini BPK atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional	Predikat	WTP	WTP	100,00
	2 Tingkat Kepuasan layanan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum	Skala Likert (1-4)	3,10	3,37	108,00 (Sangat Baik)
<b>Sasaran Kegiatan 15:</b> Terkelolanya Anggaran Sekretariat Utama yang Akuntabel dan Berkualitas	3 Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	85	92,29	108,58 (Sangat Baik)
<b>Sasaran Kegiatan 16:</b> Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga Yang Baik	4 Tingkat Kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga	Skala Likert (1-4)	3,00	3,44	144,33 (Sangat Baik)
	5 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai	83	85,39	102,88 (Sangat Baik)

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Pemerintah Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional				Baik)
	6 Realisasi Anggaran Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	%	80	87,08	108,85 (Sangat Baik)

Indikator Opini BPK atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional diturunkan secara langsung dari indikator kinerja tujuan. Opini BPK masih menggunakan penilaian untuk Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2021, adapun pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Setiap tahun BPK-RI mengeluarkan opini atas laporan keuangan Kementerian yang menjadi ukuran keberhasilan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan profesionalisme sumber daya manusia yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara. Opini BPK atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2022 belum terbit sehingga masih menggunakan opini BPK pada Kementerian Pertanian dimana Badan Ketahanan Pangan sebagai embrio Badan Pangan Nasional dengan predikat WTP sehingga indikator ini mencapai 100%.

Tingkat Kepuasan Layanan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum, diukur dengan menggunakan survey kepuasan pelayanan. Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum melalui penilaian dengan memasukkan aspek pelayanan, sumber daya manusia dan proses. Pengumpulan kuesioner oleh tim Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum dengan jumlah responden sebanyak 32 orang yang berasal dari seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional, dengan hasil survey kepuasan pelayanan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum menunjukkan rata-rata kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum sebesar 3,37. Nilai tersebut melebihi target sebesar 3,10. Hal tersebut menunjukkan bahwa Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum sudah memenuhi kebutuhan para pelanggannya namun perlu ditingkatkan

secara terus-menerus agar dapat semakin menjadi lebih baik lagi dan akhirnya dapat memenuhi ekspektasi para pelanggannya yang cukup tinggi.

Indikator NKA Badan Pangan Nasional diturunkan secara langsung dari indikator kinerja program. Nilai kinerja anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2022 diperoleh dari hasil evaluasi kinerja anggaran melalui proses pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran pada tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya, Hasil evaluasi untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Evaluasi ini sebagai salah satu instrument penerapan penganggaran berbasis kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat diakses melalui Aplikasi Monev Anggaran (SMART).

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang digunakan adalah NKA Badan Ketahanan Pangan Tahun 2022. Hasil penilaian didapatkan NKA sebesar 92,29. Secara rinci hasil penilaian NKA Badan Pangan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.14. berikut:

Tabel 3. 14. Nilai Kinerja Anggaran Badan Pangan Nasional TA. 2022

No.	Indikator	Nilai
1	Capaian Sasaran Program	97,71
2	Penyerapan Anggaran	87,08
3	Konsistensi	98,29
4	Capaian Kinerja Program	100,00
5	Efisiensi	13,25
6	Nilai Efisiensi	83,12
<b>NKA</b>		92,29

Pelaksanaan tata kelola ketatausahaan pimpinan dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada pimpinan serta pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional yang baik. Oleh karena itu, tingkat kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi menjadi indikator dalam penilaian pelaksanaan tata kelola ketatausahaan pimpinan. Penilaian Tingkat Kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan bagian tata usaha pimpinan, protokol, dan rumah tangga dilakukan dengan metode survey kepada seluruh pegawai Badan Pangan Nasional. Hasil survey Tingkat Kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan Bagian

Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga menunjukkan rata-rata sebesar 3,44. Nilai tersebut melebihi target sebesar 3,10. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga sudah memenuhi kebutuhan para pelanggannya namun perlu ditingkatkan secara terus-menerus agar dapat semakin menjadi lebih baik lagi dan akhirnya dapat memenuhi ekspektasi para pelanggannya yang cukup tinggi.

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional Tahun 2022, sebelum bertransformasi menjadi Badan Pangan Nasional, sebagai unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan telah mendapatkan nilai AKIP tahun 2021 sebesar 85,39. Sebagai lembaga baru yang masih terus melakukan upaya-upaya penyesuaian, nilai AKIP Lingkup Badan Pangan Nasional pada Tahun 2022 mengadopsi nilai AKIP BKP Kementerian Pertanian tahun 2021 dengan nilai 85,39.

Realisasi anggaran lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional dilihat dari realisasi anggaran eselon I berdasarkan aplikasi *Online Monitoring (OM) SPAN* Kementerian Keuangan per tanggal 31 Desember 2022. Dari hasil perhitungan realisasi anggaran lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional TA. 2022 sebesar 87,08% secara rinci realisasi anggaran lingkup eselon I Badan Pangan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.15. berikut:

Tabel 3. 15. Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional TA. 2022

No	Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	109.616.600.000	83.843.778.679	76,49
2	Deputi Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi	36.762.453.000	33.744.817.887	91,79
3	Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	40.707.225.000	37.482.190.182	92,08
4	Sekretariat Utama	90.279.388.000	86.445.785.744	95,75
	<b>Total</b>	<b>277.365.666.000</b>	<b>241.516.572.522</b>	<b>87,08</b>

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa persentase untuk 3 (tiga) unit kerja eselon I Lingkup Badan Pangan Nasional berada di atas 90% hanya Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang berada di bawah 90%. Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan tidak dapat terserap secara maksimal antara lain: 1) Kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP); dan 2). Kegiatan Operasi Pasar/Bazar Pangan Murah.

Realisasi Badan Pangan sebesar 87,08 sudah maksimal, mengingat buka Blokir Anggaran Badan Pangan Nasional baru dibuka pada akhir bulan Mei 2022 dan struktur organisasi Badan Pangan secara lengkap baru terisi pada akhir bulan Juni 2022. Sehingga secara efektif pelaksanaan kegiatan dan anggaran Badan Pangan Nasional baru berjalan di Bulan Juli 2022 atau semester II TA. 2022.

#### **3.1.4. Efisiensi Anggaran**

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, Badan Pangan Nasional merealisasikan penggunaan anggaran berdasarkan pagu yang telah ditetapkan. Efisiensi diperlukan dalam menggunakan anggaran yang ada dengan bijak untuk merealisasikan rencana kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang maksimal. Dengan adanya angka efisiensi maka dapat ditelaah lebih lanjut apakah kinerja organisasi sudah efektif atau hanya pemborosan anggaran. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, efisiensi didapat dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran Rp} \times \text{Capaian Kinerja \%}) - \text{Realisasi Anggaran Rp}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja \%}} \times 100\%$$

Pada peraturan yang sama juga dinyatakan bahwa batas maksimum nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimum adalah -20%. Dengan asumsi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin efisiensinya mendekati 20% maka kinerja kegiatan dan anggaran semakin baik, begitu pula sebaliknya. Dengan

menggunakan rumus diatas, didapatkan angka efisiensi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional pada tahun 2022 sebesar 9,43%. Agar mudah diinterpretasikan, efisiensi dapat dikonversi menjadi skala 0%-100%. Merujuk pada peraturan yang sama, Nilai Efisiensi dengan skala 0-100% didapatkan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{\text{Efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Dengan menggunakan rumus diatas, Nilai Efisiensi Kinerja Anggaran Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional pada tahun 2022 sebesar 73,59%. Dari nilai efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran Badan Pangan Nasional termasuk dalam kategori Cukup Baik.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Petikan Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-018.11.1.452332/2022 Pagu awal sekretariat Utama adalah sebesar Rp85.264.785.000,- dan setelah direvisi sampai dengan akhir Desember 2022 sehingga pagu menjadi Rp.90.279.388.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp86.445.785.744,- atau 95,75%. Pagu dan realisasi anggaran Sekretariat Utama Tahun 2022 per unit kerja dapat dilihat pada tabel 3.16. berikut:

Tabel 3. 16. Realisasi Anggaran Sekretariat Utama Tahun 2022

No	Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pusat Data dan Informasi Pangan	3.296.180.000	3.178.392.256	96,43
2	Inspektorat	2.300.000.000	2.226.477.772	96,80
3	Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat	20.808.346.000	20.405.095.942	98,05
4	Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum	56.013.458.000	53.212.033.223	95,01
5	Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum	7.861.404.000	7.423.786.601	94,43
	<b>Total</b>	<b>90.279.388.000</b>	<b>86.445.785.744</b>	<b>95,75</b>

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi anggaran Sekretariat Utama sebesar Rp86.445.785.744,- atau 95,75% dimana realisasi terbesar pada unit Biro



Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat sebesar 98,05% dan realisasi terkecil pada unit Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum sebesar 94,53%. Realisasi anggaran tersebut lebih besar dari realisasi Badan Pangan Nasional dengan realisasi anggaran sebesar 87,08%.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tujuan, sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan lingkup Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022, berikut kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan:

### 4.1. Kesimpulan

Dari hasil perhitungan capaian kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai organisasi baru, penilaian capaian kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional menggunakan metode perbandingan antara target awal dengan capaian akhir tahun terhadap indikator yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan beberapa Indikator tidak memiliki *baseline* ataupun pembanding dengan tahun sebelumnya;
2. Kontribusi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional terhadap capaian Tujuan Badan Pangan Nasional dapat dikatakan sangat baik dengan capaian kinerja tujuan organisasi yang diampu oleh Sekretariat Utama sebesar 102,61%.
3. Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 dapat dikatakan sangat baik dengan capaian sasaran program sebesar 105,72% dari target yang ditetapkan.

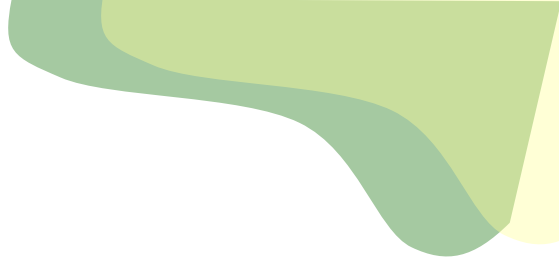


4. Pencapaian sasaran kegiatan lingkup Sekretariat Utama dapat dikatakan sangat baik, yaitu di atas 100% untuk semua indikator kegiatan yang diampu oleh unit eselon II yang berada di bawah dan berkoordinasi dengan Sekretariat Utama.

#### **4.2. Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan sesuai dengan analisis dari kesimpulan yang telah disebutkan, berikut beberapa saran dan rekomendasi yang diberikan:

1. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja mendatang, dalam melakukan penilaian capaian kinerja selain membandingkan antara target awal dan capaian akhir, dapat dilakukan juga penilaian capaian dengan membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, menganalisis dengan capaian jangka menengah ataupun menampilkan capaian - capaian lain yang bukan merupakan indikator kinerja utama.
2. Walaupun capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, masih ada beberapa indikator yang masih bisa ditingkatkan pencapaiannya seperti: 1). Realisasi penyerapan anggaran; 2). Peningkatan SDM; dan 3). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, agar proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja dapat berjalan dengan baik.
3. Beberapa capaian kinerja indikator masih menggunakan capaian kinerja instansi Badan Ketahanan Pangan maupun Kementerian Pertanian seperti: 1). Opini BPK; 2). Nilai Kinerja Anggaran; 3). Maturitas SPIP; dan 4). Tingkat Kapabilitas APIP. Ke depan setelah proses transformasi Badan Pangan Nasional selesai dapat menggunakan capaian indikator Badan Pangan Nasional.
4. Dari hasil pembahasan awal dengan APIP Badan Pangan Nasional, perlu dilakukan reviu terhadap Renstra Badan Pangan Nasional agar Indikator Kinerja Utama dapat terukur secara jelas.



## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2021

sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.


### ***Opini***

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Pertanian tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### ***Laporan atas SPI dan Kepatuhan***

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 9b/LHP/XVII/05/2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 27 Mei 2022  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN



Syamsudin S.E., M.Si., Ak., CSFA, CPA, CFrA, CFE  
Register Negara Akuntan No. RNA - 17113 *ma*

Lampiran 2. Jenis Aplikasi Yang Telah Terintegrasi/di-link-kan

No	Nama Aplikasi	Penjelasan/Manfaat Aplikasi
1	E-Kehadiran	Memberikan informasi kehadiran/presensi pegawai yang dapat dipantau oleh pimpinan.
2	E-Kinerja	Memberikan informasi pengukuran kinerja pegawai yang dapat dipantau oleh pimpinan.
3	SIM ASN	Sebagai <i>database</i> pegawai Badan Pangan Nasional yang mencakup data: pribadi, riwayat pekerjaan, pendidikan, dll.
4	Aplikasi QR Pegawai	Memberikan data sederhana pegawai pada kartu pegawai atau <i>name tag</i> .
5	Evaluasi Kinerja Jabatan Fungsional	Memberikan informasi kepegawaian pejabat fungsional Analisis Ketahanan Pangan; memberikan kemudahan bagi pejabat fungsional Analisis Ketahanan Pangan dalam menyampaikan output kerjanya; dan memudahkan pimpinan memantau dan menilai kerjanya.
6	Tanda Tangan Elektronik	Memberikan pengamanan, kemudahan dan kecepatan bagi pegawai, Kepala Tata Usaha, Sekretaris Pimpinan dalam surat menyurat.
7	E-Sakip	Memberikan informasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Pangan Nasional; memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam menyampaikan output kinerja SAKIP; dan memudahkan pimpinan memantau dan menilai kinerja SAKIP.
8	<i>Helpdesk</i> dan Layanan Publik (PPID)	Memberikan kemudahan bagi pegawai dan pengguna dalam menyampaikan keluhan dan permintaan informasi tentang Badan Pangan Nasional; mengetahui kepuasan pengguna/penerima manfaat; meningkatkan kualitas layanan data dan informasi.

No	Nama Aplikasi	Penjelasan/Manfaat Aplikasi
9	Website Badan Pangan Nasional	Memberikan informasi tentang Badan Pangan Nasional melalui berita, profil, informasi publik, media sosial, dan tautan informasi dari K/L terkait maupun Dinas Pangan Daerah.
10	Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Memberikan informasi tentang Badan Pangan Nasional melalui penyediaan dokumen peraturan/regulasi yang diproduksi oleh Badan Pangan Nasional maupun K/L terkait.
11	Aplikasi Panel Data Harga Pangan dan Pasokan Pangan	Memberikan informasi kondisi pasokan dan harga pangan yang cepat ( <i>up to date</i> ) dan akurat; memberikan kemudahan bagi enumerator dalam menginput informasi.
12	Aplikasi Layanan Informasi Stok Pangan Strategis (Simonstock)	Memberikan informasi kondisi stok pangan strategis; memantau data stok pangan strategis di tingkat penggilingan dan pedagang; memberikan kemudahan enumerator daerah dalam menyampaikan informasi stok.
13	Sistem Pelaporan Neraca Pangan Wilayah / Neraca Bahan Makanan	Memberikan informasi kondisi neraca pangan strategis wilayah; memantau data neraca pangan strategis wilayah; memberikan kemudahan dinas pangan dalam menyampaikan informasi neraca.
14	Sistem Informasi Cadangan Pangan	Memberikan informasi kondisi cadangan pangan; memantau cadangan pangan strategis; memberikan kemudahan dinas pangan dalam menyampaikan informasi cadangan pangan.
15	Aplikas FSVA dan IKP	Menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi; memberikan kemudahan dinas pangan dalam menyampaikan informasi kondisi ketahanan pangan wilayah.

No	Nama Aplikasi	Penjelasan/Manfaat Aplikasi
16	Sistem Database Keamanan Pangan	Memberikan informasi jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan produk PSAT; memantau kondisi keamanan pangan nasional dan daerah.
17	Aplikasi Konsumsi Pangan	Memberikan informasi kondisi pola konsumsi pangan energi dan protein (Pola Pangan Harapan).
18	SITINJU Hasil Pemeriksaan BPN	Merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk automisasi, dokumentasi dan efisiensi Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pangan Nasional.
19	<i>Dashboard</i> Satu Data Pangan Nasional	Aplikasi yang dapat memberikan informasi penting tentang data prioritas dengan analisis data.

Alamat website Integrasi Satu Data Pangan: [portalsatudata.badanpangan.go.id](https://portalsatudata.badanpangan.go.id) di masa peralihan masih menggunakan domain <https://dashboardpangan.caffelum.xyz>

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarwo Edhy  
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arief Prasetyo Adi  
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Oktober 2022

Pihak Kedua



Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama



Sarwo Edhy

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**Plt. SEKRETARIS UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Pengembangan data dan informasi pangan	1-1- Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	3,0 Indeks
2	Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	2-1- Nilai Reformasi Birokrasi	76 Nilai
		2-2- Nilai Kinerja Anggaran	85 Nilai

**KEGIATAN**

- 1 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya  
Badan Pangan Nasional

**ANGGARAN**

Rp92.278.934.000,-

Jakarta, 25 Oktober 2022

Kepala Badan Pangan Nasional,

Plt. Sekretaris Utama,



Arief Prasetyo Adi



Sarwo Edhy



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarwo Edhy  
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arief Prasetyo Adi  
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 November 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Arief Prasetyo Adi



Sarwo Edhy

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**Pit. SEKRETARIS UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Pengembangan data dan informasi pangan	1-1- Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	3,0 Indeks
2	Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	2-1- Nilai Reformasi Birokrasi	76 Nilai
		2-2- Nilai Kinerja Anggaran	85 Nilai

**KEGIATAN**

- 1 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya  
Badan Pangan Nasional

**ANGGARAN**

Rp94.121.992.000,-

Jakarta, 2 November 2022

Kepala Badan Pangan Nasional

Plt. Sekretaris Utama



Arief Prasetyo Adi



Sarwo Edhy

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarwo Edhy  
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arief Prasetyo Adi  
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2022

Pihak Kedua



Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama



Sarwo Edhy

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
Plt. SEKRETARIS UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Pengembangan data dan informasi pangan	1-1- Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	3,0 Indeks
2	Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	2-1- Nilai Reformasi Birokrasi	76 Nilai
		2-2- Nilai Kinerja Anggaran	85 Nilai

**KEGIATAN**

- 1 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya  
Badan Pangan Nasional

**ANGGARAN**

Rp90.279.388.000,-

Jakarta, 2 Desember 2022

Kepala Badan Pangan Nasional,

Plt. Sekretaris Utama,



Arief Prasetyo Adi



Sarwo Edhy

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Muhammad Imron Rosjidi

Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sarwo Edhy

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 November 2022

Pihak Kedua



Sarwo Edhy

Pihak Pertama



R. Muhammad Imron Rosjidi

Mengetahui,  
Kepala Badan Pangan Nasional



Arief Prasetyo Adi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTUR**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1-1- Tingkat Maturitas SPIP	3,00 Level
		1-2- Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	3,00 Level
		1-3- Tingkat Kepuasan Layanan Inspektorat	3,10 Skala Likert
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Inspektorat yang Efektif, Efesien dan Akuntabel	2-1- Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat Terhadap Layanan Ketatausahaan	3,00 Skala Likert

**KEGIATAN**

1. Layanan Pengawasan dan Pengendalian

**ANGGARAN**

Rp2.300.000.000,-

Jakarta, 3 November 2022

Pihak Kedua

  
Sarwo Edhy

Pihak Pertama

  
R. Muhammad Imron Rosjidi

Mengetahui,  
Kepala Badan Pangan Nasional



Arief Prasetyo Adi

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kelik Budiana

Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sarwo Edhy

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Oktober 2022

Pihak Kedua,



Sarwo Edhy

Pihak Pertama,



Kelik Budiana

Mengetahui,

Kepala Badan Pangan Nasional



Arief Prasetyo Adi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pangan	1-1- Jumlah Aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi pangan nasional	18
		1-2- Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan	3,10 (Skala Likert)
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Pangan yang efektif, efisien dan akuntabel	2-1- Tingkat kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan	3,00 (Skala Likert)

**KEGIATAN**

**ANGGARAN**

Pengelolaan dan Layanan Data dan Informasi	Rp.	2.396.110.000,-
Peningkatan Layanan Statistik dan Analisis Pangan	Rp.	900.070.000,-
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.296.180.000,-</b>

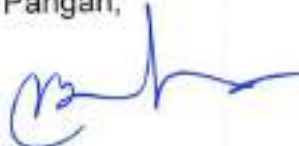
Jakarta, 26 Oktober 2022

Plt. Sekretaris Utama,



Sarwo Edhy

Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan,



Kelik Budiana

Mengetahui,

Kepala Badan Pangan Nasional



Arief Prasetyo Adi



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enny Indarti

Jabatan : Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sarwo Edhy

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 5 Desember 2022

Pihak Kedua



Sarwo Edhy

Pihak Pertama



Enny Indarti

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BIRO KEUANGAN, PENGADAAN, DAN UMUM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata kelola Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum yang baik	1-1- Opini BPK atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional	WTP Predikat
		1-2- Tingkat kepuasan layanan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum	3,10 Skala Likert
2	Tatakelola Anggaran Sekretariat Utama yang Akuntabel dan Berkualitas	2-1- Nilai Kinerja Anggaran	85,00 Nilai
3	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga yang baik	3-1- Tingkat kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga	3,00 Skala Likert
		3-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	83,00 Nilai
		3-3- Realisasi Anggaran Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	80,00 %

**KEGIATAN**

1. Keprotokolan Kepala Badan
  2. Layanan Umum
  3. Layanan Perkantoran
  4. Layanan Sarana Internal
  5. Layanan Operasional Sekretariat Utama
  6. Layanan Manajemen Keuangan
- Total

**ANGGARAN**

Rp1.722.725.000,-  
 Rp9.451.418.000,-  
 Rp33.395.326.000,-  
 Rp. 7.799.438.000,-  
 Rp. 500.000.000,-  
 Rp. 3.144.551.000,-  
 Rp56.013.458.000,-

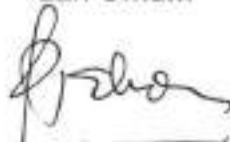
Jakarta, 5 Desember 2022

Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

Kepala Biro Keuangan, Pengadaan,  
dan Umum



Enny Indarti

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enny Indarti

Jabatan : Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sarwo Edhy

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Oktober 2022

Pihak Kedua



Sarwo Edhy

Pihak Pertama



Enny Indarti

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BIRO KEUANGAN, PENGADAAN, DAN UMUM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata kelola Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum yang baik	1-1- Opini BPK atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional	WTP Predikat
		1-2- Tingkat kepuasan layanan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum	3,10 Skala Likert
2	Tatakelola Anggaran Sekretariat Utama yang Akuntabel dan Berkualitas	2-1- Nilai Kinerja Anggaran	85,00 Nilai
3	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga yang baik	3-1- Tingkat kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga	3,00 Skala Likert
		3-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	83,00 Nilai
		3-3- Realisasi Anggaran Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	80,00 %

**KEGIATAN**

1. Keprotokolan Kepala Badan
  2. Layanan Umum
  3. Layanan Perkantoran
  4. Layanan Sarana Internal
  5. Layanan Operasional Sekretariat Utama
  6. Layanan Manajemen Keuangan
  7. Pengelolaan Manajemen Keuangan Daerah
- Total

**ANGGARAN**

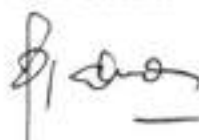
- Rp1.722.725.000,-  
 Rp9.254.618.000,-  
 Rp33.395.326.000,-  
 Rp. 7.907.430.000,-  
 Rp. 500.000.000,-  
 Rp. 2.323.551.000,-  
 Rp. 1.938.354.000,-  
 Rp57.042.004.000,-

Jakarta, 26 Oktober 2022

Plt. Sekretaris Utama

  
Sarwo Edhy

Kepala Biro Keuangan, Pengadaan,  
dan Umum

  
Enny Indarti

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enny Indarti

Jabatan : Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sarwo Edhy

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Oktober 2022

Pihak Kedua



Sarwo Edhy

Pihak Pertama



Enny Indarti

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BIRO KEUANGAN, PENGADAAN, DAN UMUM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata kelola Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum yang baik	1-1- Opini BPK atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional	WTP Predikat
		1-2- Tingkat kepuasan layanan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum	3,10 Skala Likert
2	Tatakelola Anggaran Sekretariat Utama yang Akuntabel dan Berkualitas	2-1- Nilai Kinerja Anggaran	85,00 Nilai
3	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga yang baik	3-1- Tingkat kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga	3,00 Skala Likert
		3-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	83,00 Nilai
		3-3- Realisasi Anggaran Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	80,00 %

**KEGIATAN**

1. Keprotokolan Kepala Badan
  2. Layanan Umum
  3. Layanan Perkantoran
  4. Layanan Sarana Internal
  5. Layanan Operasional Sekretariat Utama
  6. Layanan Manajemen Keuangan
  7. Pengelolaan Manajemen Keuangan Daerah
- Total

**ANGGARAN**

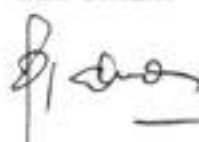
- Rp1.722.725.000,-  
 Rp9.254.618.000,-  
 Rp33.395.326.000,-  
 Rp. 7.907.430.000,-  
 Rp. 500.000.000,-  
 Rp. 2.323.551.000,-  
 Rp. 1.938.354.000,-  
 Rp57.042.004.000,-

Jakarta, 26 Oktober 2022

Plt. Sekretaris Utama

  
Sarwo Edhy

Kepala Biro Keuangan, Pengadaan,  
dan Umum

  
Enny Indarti

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enny Indarti

Jabatan : Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sarwo Edhy

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

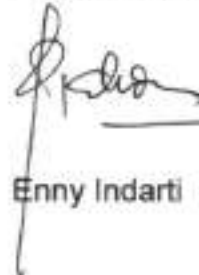
Jakarta, 3 November 2022

Pihak Kedua



Sarwo Edhy

Pihak Pertama



Enny Indarti

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BIRO KEUANGAN, PENGADAAN, DAN UMUM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata kelola Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum yang baik	1-1- Opini BPK atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional	WTP Predikat
		1-2- Tingkat kepuasan layanan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum	3,10 Skala Likert
2	Tatakelola Anggaran Sekretariat Utama yang Akuntabel dan Berkualitas	2-1- Nilai Kinerja Anggaran	85,00 Nilai
3	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga yang baik	3-1- Tingkat kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga	3,00 Skala Likert
		3-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	83,00 Nilai
		3-3- Realisasi Anggaran Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	80,00 %

**KEGIATAN**

1. Keprotokolan Kepala Badan
  2. Layanan Umum
  3. Layanan Perkantoran
  4. Layanan Sarana Internal
  5. Layanan Operasional Sekretariat Utama
  6. Layanan Manajemen Keuangan
  7. Pengelolaan Manajemen Keuangan Daerah
- Total

**ANGGARAN**

- Rp1.722.725.000,-  
 Rp9.451.418.000,-  
 Rp33.395.326.000,-  
 Rp. 9.703.688.000,-  
 Rp. 500.000.000,-  
 Rp. 2.753.551.000,-  
 Rp. 1.938.354.000,-  
 Rp59.465.062.000,-

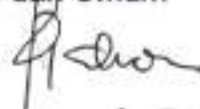
Jakarta, 3 November 2022

Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

Kepala Biro Keuangan, Pengadaan,  
dan Umum



Enny Indarti



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enny Indarti

Jabatan : Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sarwo Edhy

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 November 2022

Pihak Kedua



Sarwo Edhy

Pihak Pertama



Enny Indarti

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BIRO KEUANGAN, PENGADAAN, DAN UMUM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata kelola Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum yang baik	1-1- Opini BPK atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional	WTP Predikat
		1-2- Tingkat kepuasan layanan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum	3,10 Skala Likert
2	Tatakelola Anggaran Sekretariat Utama yang Akuntabel dan Berkualitas	2-1- Nilai Kinerja Anggaran	85,00 Nilai
3	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga yang baik	3-1- Tingkat kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga	3,00 Skala Likert
		3-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	83,00 Nilai
		3-3- Realisasi Anggaran Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	80,00 %

**KEGIATAN**

1. Keprotokolan Kepala Badan
  2. Layanan Umum
  3. Layanan Perkantoran
  4. Layanan Sarana Internal
  5. Layanan Operasional Sekretariat Utama
  6. Layanan Manajemen Keuangan
  7. Pengelolaan Manajemen Keuangan Daerah
- Total

**ANGGARAN**


Rp1.722.725.000,-  
 Rp9.451.418.000,-  
 Rp33.395.326.000,-  
 Rp. 9.703.688.000,-  
 Rp. 500.000.000,-  
 Rp. 2.949.551.000,-  
 Rp. 1.938.354.000,-  
 Rp59.661.062.000,-

Jakarta, 29 November 2022

Plt. Sekretaris Utama

  
 Sarwo Edhy

Kepala Biro Keuangan, Pengadaan,  
 dan Umum

  
 Enny Indarti

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enny Indarti

Jabatan : Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sarwo Edhy

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 5 Desember 2022

Pihak Kedua



Sarwo Edhy

Pihak Pertama



Enny Indarti

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BIRO KEUANGAN, PENGADAAN, DAN UMUM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata kelola Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum yang baik	1-1- Opini BPK atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional	WTP Predikat
		1-2- Tingkat kepuasan layanan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum	3,10 Skala Likert
2	Tatakelola Anggaran Sekretariat Utama yang Akuntabel dan Berkualitas	2-1- Nilai Kinerja Anggaran	85,00 Nilai
3	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga yang baik	3-1- Tingkat kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga	3,00 Skala Likert
		3-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	83,00 Nilai
		3-3- Realisasi Anggaran Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	80,00 %

**KEGIATAN**

1. Keprotokolan Kepala Badan
  2. Layanan Umum
  3. Layanan Perkantoran
  4. Layanan Sarana Internal
  5. Layanan Operasional Sekretariat Utama
  6. Layanan Manajemen Keuangan
- Total

**ANGGARAN**

Rp1.722.725.000,-  
 Rp9.451.418.000,-  
 Rp33.395.326.000,-  
 Rp. 7.799.438.000,-  
 Rp. 500.000.000,-  
 Rp. 3.144.551.000,-  
 Rp56.013.458.000,-

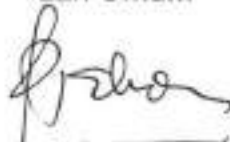
Jakarta, 5 Desember 2022

Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

Kepala Biro Keuangan, Pengadaan,  
dan Umum



Enny Indarti

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas

Jabatan : Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sarwo Edhy

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 November 2022

Pihak Kedua



Sarwo Edhy

Pihak Pertama



Anas

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata kelola Biro Organisasi, SDM dan Hukum yang baik	1-1- Nilai Indeks Manajemen Perubahan	4,00 Nilai
		1-2- Deregulasi Kebijakan	2,80 Nilai
		1-3- Nilai Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi	3,30 Nilai
		1-4- Nilai Indeks Penataan Tata Laksana	4,50 Nilai
		1-5- Nilai Indeks Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	2,50 Nilai
		1-6- Nilai Indeks Penguatan Pengawasan	3,00 Nilai
		1-7- Nilai Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4,90 Nilai
		1-8- Tingkat kepuasan layanan Biro Organisasi, SDM dan Hukum	3,10 Skala Likert

**KEGIATAN**

1. Layanan Hukum
2. Layanan Manajemen Organisasi dan Tatalaksana
4. Layanan Manajemen SDM
- Total

**ANGGARAN**

Rp1.499.475.000,-  
Rp971.157.000,-  
Rp5.390.772.000,-  
Rp7.861.404.000,-

Jakarta, 3 November 2022

Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum



Anas

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas

Jabatan : Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sarwo Edhy

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Oktober 2022

Pihak Kedua



Sarwo Edhy

Pihak Pertama



Anas

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata kelola Biro Organisasi, SDM dan Hukum yang baik	1-1- Nilai Indeks Manajemen Perubahan	4,00 Nilai
		1-2- Deregulasi Kebijakan	2,80 Nilai
		1-3- Nilai Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi	3,30 Nilai
		1-4- Nilai Indeks Penataan Tata Laksana	4,50 Nilai
		1-5- Nilai Indeks Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	2,50 Nilai
		1-6- Nilai Indeks Penguatan Pengawasan	3,00 Nilai
		1-7- Nilai Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4,90 Nilai
		1-8- Tingkat kepuasan layanan Biro Organisasi, SDM dan Hukum	3,10 Skala Likert

**KEGIATAN**

1. Layanan Hukum
2. Layanan Manajemen Organisasi dan Tatalaksana
4. Layanan Manajemen SDM
- Total

**ANGGARAN**

Rp1.500.000.000,-  
Rp1.120.632.000,-  
Rp5.390.772.000,-  
Rp8.011.404.000,-

Jakarta, 26 Oktober 2022

Pit. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum



Anas



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risfaheri

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sarwo Edhy

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Desember 2022

Pihak Kedua



Sarwo Edhy

Pihak Pertama



Risfaheri

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik.	1-1- Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	5 Nilai
		1-2- Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	83,00 Nilai
2	Terpenuhinya Layanan Kerjasama Bidang Pangan	2-1- Persentase Kerjasama Bidang Pangan yang ditindaklanjuti	100%
3	Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima	3-1- Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik	3,00 Skala Likert

**KEGIATAN**

1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
  2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
  3. Layanan Hubungan Masyarakat
- Total

**ANGGARAN**

Rp14.888.146.000,-  
Rp1.102.700.000,-  
Rp4.817.500.000,-  
Rp20.808.346.000,-

Jakarta, 5 Desember 2022

Plt. Sekretaris Utama

Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama,  
dan Hubungan Masyarakat



Sarwo Edhy



Risfaheri

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risfaheri

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sarwo Edhy

Jabatan : Pjt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 November 2022

Pihak Kedua



Sarwo Edhy

Pihak Pertama



Risfaheri

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik.	1-1- Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	5 Nilai
		1-2- Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	83,00 Nilai
2	Terpenuhinya Layanan Kerjasama Bidang Pangan	2-1- Persentase Kerjasama Bidang Pangan yang ditindaklanjuti	100%
3	Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima	3-1- Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik	3,00 Skala Likert

**KEGIATAN**

1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
  2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
  3. Layanan Hubungan Masyarakat
- Total

**ANGGARAN**

Rp15.015.346.000,-  
Rp1.170.500.000,-  
Rp4.817.500.000,-  
Rp21.003.346.000,-

Jakarta, 29 November 2022

Plt. Sekretaris Utama,

Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama,  
dan Hubungan Masyarakat,



Sarwo Edhy



Risfaheri

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risfaheri

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sarwo Edhy

Jabatan : Pft. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Oktober 2022

Pihak Kedua



Sarwo Edhy

Pihak Pertama



Risfaheri

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik.	1-1- Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	5 Nilai
		1-2- Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	83,00 Nilai
2	Terpenuhinya Layanan Kerjasama Bidang Pangan	2-1- Persentase Kerjasama Bidang Pangan yang ditindaklanjuti	100%
3	Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima	3-1- Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik	3,00 Skala Likert

**KEGIATAN**

1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
  2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
  3. Layanan Hubungan Masyarakat
- Total

**ANGGARAN**

Rp15.188.346.000,-  
Rp1.423.500.000,-  
Rp4.817.500.000,-  
Rp21.429.346.000,-

Jakarta, 26 Oktober 2022

Plt. Sekretaris Utama,

Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama,  
dan Hubungan Masyarakat,



Sarwo Edhy



Risfaheri

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : E. Rini Yusniana

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Enny Indarti

Jabatan : Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Oktober 2022

Pihak Kedua,



Enny Indarti

Pihak Pertama,




E. Rini Yusniana

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, PROTOKOL DAN RUMAH TANGGA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga yang baik	1-1-Tingkat Kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga	3,00 Skala Likert
		1-2- Nilai AKuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah Lingkup eselon I Badan Pangan Nasional	83,00 Nilai
		1-3- Realisasi Anggaran Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	80 %

Jakarta, 27 Oktober 2022

Kepala Biro Keuangan, Pengadaan,  
dan Umum,



Enny Indarti

Kepala Bagian Tata Usaha  
Pimpinan, Protokol, dan Rumah  
Tangga



E. Rini Yusniana



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : E. Rini Yusniana

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Enny Indarti

Jabatan : Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 November 2022

Pihak Kedua,



Enny Indarti

Pihak Pertama,



E. Rini Yusniana

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, PROTOKOL DAN RUMAH TANGGA**


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga yang baik	1-1-Tingkat Kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga	3,00 Skala Likert
		1-2- Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup eselon I Badan Pangan Nasional	83,00 Nilai
		1-3- Realisasi Anggaran Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	80 %

Jakarta, 4 November 2022

Kepala Biro Keuangan, Pengadaan,  
dan Umum,

  
Enny Indarti

Kepala Bagian Tata Usaha  
Pimpinan, Protokol, dan Rumah  
Tangga

  
E. Rini Yusniana

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : E. Rini Yusniana

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Enny Indarti

Jabatan : Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

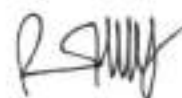
Jakarta, 6 Desember 2022

Pihak Kedua,



Enny Indarti

Pihak Pertama,



E. Rini Yusniana

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, PROTOKOL DAN RUMAH TANGGA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga yang baik	1-1-Tingkat Kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga	3,00 Skala Likert
		1-2- Nilai AKuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah Lingkup eselon I Badan Pangan Nasional	83,00 Nilai
		1-3- Realisasi Anggaran Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	80 %

Jakarta, 6 Desember 2022

Kepala Biro Keuangan, Pengadaan,  
dan Umum,



Enny Indarti

Kepala Bagian Tata Usaha  
Pimpinan, Protokol, dan Rumah  
Tangga



E. Rini Yusniana

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BIRO KEUANGAN, PENGADAAN, DAN UMUM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata kelola Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum yang baik	1-1- Opini BPK atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional	WTP Predikat
		1-2- Tingkat kepuasan layanan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum	3,10 Skala Likert
2	Tatakelola Anggaran Sekretariat Utama yang Akuntabel dan Berkualitas	2-1- Nilai Kinerja Anggaran	85,00 Nilai
3	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga yang baik	3-1- Tingkat kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga	3,00 Skala Likert
		3-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	83,00 Nilai
		3-3- Realisasi Anggaran Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	80,00 %

**KEGIATAN**

1. Keprotokolan Kepala Badan
  2. Layanan Umum
  3. Layanan Perkantoran
  4. Layanan Sarana Internal
  5. Layanan Operasional Sekretariat Utama
  6. Layanan Manajemen Keuangan
- Total

**ANGGARAN**

Rp1.722.725.000,-  
 Rp9.451.418.000,-  
 Rp33.395.326.000,-  
 Rp. 7.799.438.000,-  
 Rp. 500.000.000,-  
 Rp. 3.144.551.000,-  
 Rp56.013.458.000,-

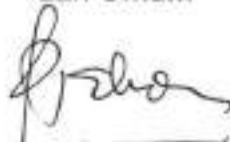
Jakarta, 5 Desember 2022

Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

Kepala Biro Keuangan, Pengadaan,  
dan Umum



Enny Indarti

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bhaskoro Dwi Widhianto

Jabatan : Kepala Subbagian Protokol, Rumah Tangga dan Kearsipan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : E. Rini Yusrniana

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua,



E Rini Yusrniana

Pihak Pertama,



Bhaskoro Dwi Widhianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SUBBAGIAN PROTOKOL, RUMAH TANGGA DAN KEARSIPAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Protokol, Rumah Tangga dan Kearsipan yang baik	1-1- Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap layanan keprotokolan	3,00 Skala
		1-2-Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Manajemen Rumah Tangga dan Kearsipan lingkup Badan Pangan Nasional	3,00 Skala

Jakarta, 28 Oktober 2022

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol,  
dan Rumah Tangga



E. Rini Yusniana

Kepala Subbagian Protokol,  
Rumah Tangga dan  
Kearsipan



Bhaskoro Dwi Widhianto

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bhaskoro Dwi Widhianto

Jabatan : Kepala Subbagian Protokol, Rumah Tangga dan Kearsipan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : E. Rini Yusniana

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 November 2022

Pihak Kedua,



E. Rini Yusniana

Pihak Pertama,



Bhaskoro Dwi Widhianto



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SUBBAGIAN PROTOKOL, RUMAH TANGGA DAN KEARSIPAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Protokol, Rumah Tangga dan Kearsipan yang baik	1-1- Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap layanan keprotokolan	3,00 Skala
		1-2-Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Manajemen Rumah Tangga dan Kearsipan lingkup Badan Pangan Nasional	3,00 Skala

Jakarta, 7 November 2022

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol,  
dan Rumah Tangga



E. Rini Yusniana

Kepala Subbagian Protokol,  
Rumah Tangga dan  
Kearsipan



Bhaskoro Dwi Widhiyanto

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bhaskoro Dwi Widhianto

Jabatan : Kepala Subbagian Protokol, Rumah Tangga dan Kearsipan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : E. Rini Yusniana

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Desember 2022

Pihak Kedua,



E. Rini Yusniana

Pihak Pertama,



Bhaskoro Dwi Widhianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SUBBAGIAN PROTOKOL, RUMAH TANGGA DAN KEARSIPAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Protokol, Rumah Tangga dan Kearsipan yang baik	1-1- Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap layanan keprotokolan	3,00 Skala
		1-2-Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Manajemen Rumah Tangga dan Kearsipan lingkup Badan Pangan Nasional	3,00 Skala

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol,  
dan Rumah Tangga



E. Rini Yushiana

Jakarta, 7 Desember 2022

Kepala Subbagian Protokol,  
Rumah Tangga dan Kearsipan



Bhaskoro Dwi Widhiyanto

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Munawwarah

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : E. Rini Yusniana

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga

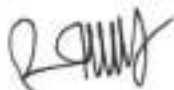
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua,



E. Rini Yusniana

Pihak Pertama,



Munawwarah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN**  
**STABILISASI PANGAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang baik	1-1-Tingkat Kepuasan Pegawai Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan terhadap layanan ketatausahaan	3,00 Skala Likert
		1-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	83,00 Nilai
		1-3- Realisasi Anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	80 %

Jakarta, 28 Oktober 2022

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan,  
Protokol, dan Rumah Tangga



E. Rini Yusniana

Kepala Sub Bagian Tata  
Usaha Deputi Bidang  
Ketersediaan dan Stabilisasi  
Pangan,



Munawwarah

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Munawwarah

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : E. Rini Yusniana

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 November 2022

Pihak Kedua,



E. Rini Yusniana

Pihak Pertama,



Munawwarah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN  
STABILISASI PANGAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang baik	1-1-Tingkat Kepuasan Pegawai Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan terhadap layanan ketatausahaan	3,00 Skala Likert
		1-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	83,00 Nilai
		1-3- Realisasi Anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	80 %

Jakarta, 7 November 2022

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan,  
Protokol, dan Rumah Tangga



E. Rini Yusniana

Kepala Sub Bagian Tata  
Usaha Deputy Bidang  
Ketersediaan dan Stabilisasi  
Pangan,



Munawwarah

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Munawwarah

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : E. Rini Yusniana

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Desember 2022

Pihak Kedua,



E. Rini Yusniana

Pihak Pertama,



Munawwarah



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN  
STABILISASI PANGAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang baik	1-1-Tingkat Kepuasan Pegawai Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan terhadap layanan ketatausahaan	3,00 Skala Likert
		1-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	83,00 Nilai
		1-3- Realisasi Anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	80 %

Jakarta, 7 Desember 2022

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan,  
Protokol, dan Rumah Tangga



E. Rini Yusniana

Kepala Sub Bagian Tata  
Usaha Deputy Bidang  
Ketersediaan dan Stabilisasi  
Pangan,



Munawwarah

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Karmilah

Jabatan : Kepala Subbagian TU Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : E. Rini Yusniana

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua,



E. Rini Yusniana

Pihak Pertama,



Siti Karmilah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN**  
**GIZI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi yang baik	1-1-Tingkat Kepuasan Pegawai Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, terhadap layanan ketatausahaan	3,00 Skala Likert
		1-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi,	83,00 Nilai
		1-3- Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi,	80 %

Jakarta, 28 Oktober 2022

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan,  
Protokol, dan Rumah Tangga



E. Rini Yurniana

Kepala Subbagian Tata  
Usaha Deputi Bidang  
Kerawanan Pangan dan  
Gizi,



Siti Karmilah

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Karmilah

Jabatan : Kepala Subbagian TU Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : E. Rini Yusniana

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 November 2022

Pihak Kedua,



E. Rini Yusniana

Pihak Pertama,



Siti Karmilah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN**  
**GIZI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi yang baik	1-1-Tingkat Kepuasan Pegawai Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, terhadap layanan ketatausahaan	3,00 Skala Likert
		1-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi,	83,00 Nilai
		1-3- Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi,	80 %

Jakarta, 7 November 2022

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan,  
Protokol, dan Rumah Tangga



E. Rini Yusniana

Kepala Subbagian Tata  
Usaha Deputi Bidang  
Kerawanan Pangan dan  
Gizi,



Siti Karmilah

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Karmilah

Jabatan : Kepala Subbagian TU Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : E. Rini Yusniana

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Desember 2022

Pihak Kedua,



E. Rini Yusniana

Pihak Pertama,



Siti Karmilah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN**  
**GIZI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi yang baik	1-1-Tingkat Kepuasan Pegawai Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, terhadap layanan ketatausahaan	3,00 Skala Likert
		1-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi,	83,00 Nilai
		1-3- Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi,	80 %

Jakarta, 7 Desember 2022

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan,  
Protokol, dan Rumah Tangga



E. Rini Yurniana

Kepala Subbagian Tata  
Usaha Deputi Bidang  
Kerawanan Pangan dan  
Gizi,



Siti Karmilah

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mulyana

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Penganekaragaman  
Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : E. Rini Yusrniana

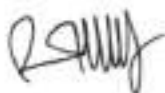
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua,



E. Rini Yusrniana

Pihak Pertama,



Mulyana



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN**  
**KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang baik	1-1-Tingkat Kepuasan Pegawai Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terhadap layanan ketatausahaan	3,00 Skala Likert
		1-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	83,00 Nilai
		1-3- Realisasi Anggaran Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	80 %

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan,  
Protokol, dan Rumah Tangga



E. Rini Yusniana

Jakarta, 28 Oktober 2022

Kepala Sub Bagian Tata  
Usaha Deputi Bidang  
Penganekaragaman  
Konsumsi dan Keamanan  
Pangan,

  
Mulyana

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mulyana

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Penganekaragaman  
Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : E. Rini Yusniana

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 November 2022

Pihak Kedua,



E. Rini Yusniana

Pihak Pertama,



Mulyana

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN**  
**KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang baik	1-1-Tingkat Kepuasan Pegawai Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terhadap layanan ketatausahaan	3,00 Skala Likert
		1-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	83,00 Nilai
		1-3- Realisasi Anggaran Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	80 %

Jakarta, 7 November 2022

Kepala Sub Bagian Tata  
Usaha Deputi Bidang  
Penganekaragaman  
Konsumsi dan Keamanan  
Pangan,

  
Mulyana

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan,  
Protokol, dan Rumah Tangga



E. Rini Yusniana

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mulyana

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : E. Rini Yusniana

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Desember 2022

Pihak Kedua,



E. Rini Yusniana

Pihak Pertama,



Mulyana

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN**  
**KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang baik	1-1-Tingkat Kepuasan Pegawai Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terhadap layanan ketatausahaan	3,00 Skala Likert
		1-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	83,00 Nilai
		1-3- Realisasi Anggaran Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	80 %

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan,  
Protokol, dan Rumah Tangga



E. Rini Yusniana

Jakarta, 7 Desember 2022

Kepala Sub Bagian Tata  
Usaha Deputi Bidang  
Penganekaragaman  
Konsumsi dan Keamanan  
Pangan,



Mulyana

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Iwan Mustofa  
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : E. Rini Yusniana  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua,



E. Rini Yusniana

Pihak Pertama,



Iwan Mustofa

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pimpinan yang baik	1-1-Tingkat Kepuasan Kepala Badan terhadap layanan ketatausahaan	3,00 Skala Likert

Jakarta, 28 Oktober 2022

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan,  
Protokol, dan Rumah Tangga



E. Rini Yusniana

Kepala Subbagian Tata  
Usaha Kepala,



Iwan Mustofa

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Iwan Mustofa  
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : E. Rini Yusniana  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 November 2022

Pihak Kedua,



E. Rini Yusniana

Pihak Pertama,



Iwan Mustofa



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pimpinan yang baik	1-1-Tingkat Kepuasan Kepala Badan terhadap layanan ketatausahaan	3,00 Skala Likert

Jakarta, 7 November 2022

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan,  
Protokol, dan Rumah Tangga



E. Rini Yusniana

Kepala Subbagian Tata  
Usaha Kepala



Iwan Mustofa

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Iwan Mustofa  
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : E. Rini Yusniana  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Desember 2022

Pihak Kedua,



E. Rini Yusniana

Pihak Pertama,



Iwan Mustofa

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pimpinan yang baik	1-1-Tingkat Kepuasan Kepala Badan terhadap layanan ketatausahaan	3,00 Skala Likert

Jakarta, 7 Desember 2022

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan,  
Protokol, dan Rumah Tangga



E. Rini Yusniana

Kepala Subbagian Tata  
Usaha Kepala,



Iwan Mustofa

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jati Alam

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : E. Rini Yusniana

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua,



E. Rini Yusniana

Pihak Pertama,



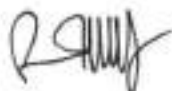
Jati Alam

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT UTAMA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Sekretariat Utama yang baik	1-1-Tingkat Kepuasan Pegawai Sekretariat Utama terhadap layanan ketatausahaan	3,00 Skala Likert
		1-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Utama	83,00 Nilai
		1-3- Realisasi Anggaran Sekretariat Utama	80 %

Jakarta, 28 Oktober 2022

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan,  
Protokol, dan Rumah Tangga



E. Rini Yusniana

Kepala Subbagian Tata  
Usaha Sekretariat Utama,



Jati Alam

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jati Alam

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : E. Rini Yusniana

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 November 2022

Pihak Kedua,



E. Rini Yusniana

Pihak Pertama,



Jati Alam

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT UTAMA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Sekretariat Utama yang baik	1-1-Tingkat Kepuasan Pegawai Sekretariat Utama terhadap layanan ketatausahaan	3,00 Skala Likert
		1-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Utama	83,00 Nilai
		1-3- Realisasi Anggaran Sekretariat Utama	80 %

Jakarta, 7 November 2022

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan,  
Protokol, dan Rumah Tangga



E. Rini Yusniana

Kepala Subbagian Tata  
Usaha Sekretariat Utama,



Jati Alam

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jati Alam

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : E. Rini Yusniana

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga

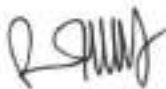
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Desember 2022

Pihak Kedua,



E. Rini Yusniana

Pihak Pertama,



Jati Alam



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT UTAMA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Sekretariat Utama yang baik	1-1-Tingkat Kepuasan Pegawai Sekretariat Utama terhadap layanan ketatausahaan	3,00 Skala Likert
		1-2- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Utama	83,00 Nilai
		1-3- Realisasi Anggaran Sekretariat Utama	80 %

Jakarta, 7 Desember 2022

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan,  
Protokol, dan Rumah Tangga



E. Rini Yusniana

Kepala Subbagian Tata  
Usaha Sekretariat Utama,



Jati Alam

**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 2531/PR.04.03/A/12/2022**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA KINERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 24.1/HK.01.06/K/10/2022 telah ditetapkan Tim Pengelola Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pangan Nasional Tahun 2022;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan pengelolaan kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pangan Nasional Tahun 2022, perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja Sekretariat Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional tentang Tim Pengelola Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
7. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024;
13. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 24.1/HK.01.06/K/10/2022 tentang Tim Pengelola Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pangan Nasional Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola SAKIP Sekretariat Utama, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola SAKIP Sekretariat Utama, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- I. Penanggungjawab:  
bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengelolaan kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022.
  - II. Ketua:  
mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022.
  - III. Sekretaris:  
melaksanakan tugas kesekretariatan untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022.
  - IV. Anggota:
    - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja masing-masing;
    - b. melaksanakan pengelolaan kinerja sesuai tugas dan fungsi untuk mencapai *output* kinerja yang menjadi tanggung jawab sesuai unit kerja masing-masing;
    - c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan kinerja sesuai tugas dan fungsi; dan
    - d. menyiapkan dan menyampaikan dokumen dan data kinerja sesuai tugas dan fungsi.
  - V. Pengumpul dan Pengelola Data:
    - a. mengumpulkan capaian *output* dan data kinerja pada masing-masing kegiatan sesuai tugas dan fungsi;
    - b. mendokumentasikan capaian *output* dan data kinerja sesuai tugas dan fungsi;
    - c. melakukan *upload* capaian *output* dan data kinerja pada <https://tinyurl.com/Evaluasi-Kinerja-Sestama-2022>;
    - d. melakukan *upload* perjanjian kinerja dan laporan kinerja dalam *Website* Badan Pangan Nasional;
    - e. melakukan *input* dan *updating* hasil pemantauan, evaluasi, dan laporan kinerja secara periodik; dan
    - f. mendokumentasikan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- KETIGA : Tim Pengelola SAKIP Sekretariat Utama melaksanakan tugas sampai dengan tersusunnya LAKIN Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 21 Desember 2022  
Plt. SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PANGAN NASIONAL,



SARWO EDHY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional;
2. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : 2531/PR.04.03/A/12/2022  
TENTANG  
TIM PENGELOLA KINERJA SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN PANGAN NASIONAL  
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KINERJA SISTEM  
AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2022

- I. Penanggung Jawab : Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M,  
Plt. Sekretaris Utama, Badan Pangan Nasional.
- II. Ketua : Ir. R.M. Imron Rasjidi., M.,Si  
Inspektur Badan Pangan Nasional.
- III. Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Risfaheri, M.Si,  
Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan  
Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama Badan  
Pangan Nasional.
- IV. Anggota : 1. Dr. Anas, S.Sos, M,M,  
Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya  
Manusia, dan Hukum, Sekretariat Utama  
Badan Pangan Nasional;  
2. Enny Indarti., STP., M.Si,  
Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan  
Umum, Sekretariat Utama Badan Pangan  
Nasional;  
3. Kelik Budiana., S.Si., M.Kom,  
Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan,  
Badan Pangan Nasional;  
4. E Rini Yusniana., S.P., M.M,  
Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan,  
Protokol, dan Rumah Tangga, Sekretariat  
Utama Badan Pangan Nasional;  
5. Muhamad Rozali, S.P,  
Perencana Ahli Maya, Badan Pangan  
Nasional.  
6. Duma Sari Simbolon, S.P.,M.Si,  
Fungsional Perencana Madya, Badan Pangan  
Nasional;  
7. Erna Djati, S.H., M.H,  
Analisis Kepegawaian Ahli Madya, Badan  
Pangan Nasional;

8. Taufik Azis, S.P,  
Analisis Anggaran Ahli Muda, Badan Pangan Nasional;
9. Arif Syaifudin, SP., M.Sc,  
Analisis Kebijakan Ahli Muda, Badan Pangan Nasional;
10. Munawar Khalil N,SS, M.Si,  
Pranata Humas Ahli Muda, Badan Pangan Nasional;
11. Rena Satrinny, S.H., M.H,  
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Badan Pangan Nasional;
12. Todilah,S.A.P., M.A.P,  
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Badan Pangan Nasional; dan
13. Rus Kurniawati, S.P., M.Si,  
Statistisi Ahli Muda, Badan Pangan Nasional.

V. Pengumpul dan Pengelola Data

1. Koordinator : Jati Alam, S.P,  
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama, Badan Pangan Nasional
2. Anggota :
  1. Bramandita, S.Si, M.Si,  
Penyusun Rencana, Kegiatan dan Anggaran Badan Pangan Nasional;
  2. Bhaskoro Dwi Widhianto, SP., ME, MPP,  
Kepala Subbagian Tata Usaha, Protokol, Rumah Tangga, dan Kearsipan, Badan Pangan Nasional;
  3. Michael Raffy Sujono, S.I.P,  
Analisis Kerja Sama, Badan Pangan Nasional;
  4. Ahmad Burhanudin,S.P,  
Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Badan Pangan Nasional; dan
  5. Iwan, S.Kom,  
Analisis Data dan Informasi, Badan Pangan Nasional.

Pt. SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PANGAN NASIONAL,



SARWO EDHY

**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL**

**NOMOR : 2033/PR.01.02/A/11/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2022 - 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL**

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 telah ditetapkan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024;
  - bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024, unit kerja eselon I di lingkungan Badan Pangan Nasional, perlu menyusun Rencana Strategis;
  - bahwa untuk menyusun Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024, perlu dibentuk Tim;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  - Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
  - Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional;



6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2022 - 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024, yang selanjutnya disebut dengan Tim Penyusun Renstra Sestama dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Renstra Sestama, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Penanggungjawab:  
bertanggungjawab atas penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024.
  - b. Ketua:  
mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024.
  - c. Sekretaris:  
melaksanakan tugas kesekretariatan untuk penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024.

- d. Anggota:
1. menyiapkan dan menyampaikan dokumen dan data dukung sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024;
  2. menyelenggarakan pertemuan pembahasan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024;
  3. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024; dan
  4. mensosialisasikan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024.
- KETIGA : Tim Penyusun Renstra Sestama melaksanakan tugas sampai dengan tersusunnya Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2022 – 2024.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 01 November 2022

Pt. SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PANGAN NASIONAL,



SARWO EDHY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
2. Inspektur Badan Pangan Nasional;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan, Badan Pangan Nasional;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PANGAN NASIONAL  
NOMOR : 2033/PR.01.02/A/11/2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL  
TAHUN 2022 - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2022 - 2024

- I. Penanggung Jawab : Dr. Ir. Sarwo Edhy, S.P., M.M,  
Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.
- II. Ketua : Prof. Dr. Ir. Risfaheri, M.Si,  
Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.
- III. Sekretaris : Muhamad Rozali, S.P,  
Perencana Ahli Madya, Badan Pangan Nasional.
- IV. Anggota : 1. Dr. Anas, S.Sos, M.M,  
Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional;  
2. Enny Indarti, STP, M.Si  
Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional;  
3. Ir. R.M. Imron Rosjidi, M.Si,  
Inspektur Badan Pangan Nasional;  
4. Duma Sari Simbolon, S.P., M.Si,  
Perencana Ahli Madya, Badan Pangan Nasional;  
5. Erna Djati, S.H., M.H,  
Analisis Kepegawaian Ahli Madya, Badan Pangan Nasional;  
6. Arif Syaifudin, ST, M.Sc,  
Analisis Kebijakan Ahli Muda, Badan Pangan Nasional;  
7. Taufik Azis, S.T. P,  
Analisis Anggaran Ahli Muda, Badan Pangan Nasional;

8. Rena Satrinny, SH, M.H,  
Perancang Peraturan Perundang-  
undangan Ahli Muda, Badan Pangan  
Nasional;
9. Rus Kurniawati, S.P., M.Si,  
Statistisi Ahli Muda, Badan Pangan  
Nasional;
10. Todilah, S.A.P., M.A.P,  
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli  
Muda, Badan Pangan Nasional; dan
11. Ahmad Burhanudin, SP,  
Analisis Monitoring, Evaluasi dan  
Pelaporan, Badan Pangan Nasional.

Plt. SEKRETARIS UTAMA



SARWO EDHY

Nomor : 038/PR.04.03/A.1/01/2023

19 Januari 2022

Lampiran : Satu lembar

Hal : Undangan Rapat Koordinasi Tim Pengelola Kinerja SAKIP  
Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional

Yth.

**(Mohon melihat daftar terlampir)**

di

Tempat

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada Rapat Koordinasi yang akan diselenggarakan pada:

hari/tanggal : Jumat, 20 Januari 2023

waktu : 08.30 WIB – selesai

tempat : RR Nusantara IV. Lantai 2 Badan Pangan Nasional

Untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi narahubung Sdri. Duma Simbolon (HP. 081317440146).

Atas kehadiran Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan,  
Kerjasama dan Humas,



*Risfaheri*

Prof. Dr. Ir. Risfaheri, M.Si  
NIP. 196401171989031002

Tembusan: Sekretaris Utama Kepala Badan Pangan Nasional.

Lampiran Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerja sama dan Hubungan Masyarakat

Nomor : 038/PR.04.03/A.1/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

## DAFTAR UNDANGAN

1. Ir. R.M. Imron Rasjidi., M.Si
2. Prof.Dr.Ir.Risfaheri,M.Si
3. Dr. Anas,S.Sos,M.M
4. Enny Indarti.,STP.,M.Si
5. Kelik Budiana.,S.Si.,M.Kom
6. E. Rini Yusniana.,S.P.,MM
7. Muhamad Rozali, S.P
8. Duma Sari Simbolon, S.P.,M.Si
9. Erna Djati, S.H.,M.H
10. Taufik Azis, S.P
11. Arif Syaifudin,S.P.,M.Sc
12. Munawar Khalil N, SS, M.Si
13. Rena Satrimmy,S.H., M.H
14. Todilah, S.A.P., M.A.P
15. Rus Kurniawati, S.P, M.Si
16. Jati Alam, S.P
17. Bramandita, S.Si, M.Si
18. Bhaskoro Dwi Widhiarto, S.P.,ME, MPP
19. Michael Raffy Sujono, S.I.P
20. Ahmad Burhanudin, S.P
21. Iwan, S.Kom

Nomor : 067/PR.04.03/A.1/02/2023

02 Februari 2023

Lampiran: Satu lembar

Hal : Undangan Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama  
Badan Pangan Nasional

Yth.

**(Mohon melihat daftar terlampir)**

di

Tempat

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada pertemuan konsolidasi yang akan diselenggarakan pada:

hari/tanggal : Jumat, 03 Februari 2023

waktu : 08.30 WIB – selesai

agenda : Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama

tempat : Ruang Chrysant 2 - Hotel Santika Bogor,

Botani Square Mall Bogor, Jl. Raya Padjadjaran Tegallega Bogor

Anggota tim agar membawa data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022. Konfirmasi kehadiran dapat menghubungi narahubung Sdri. Duma Simbolon (HP. 081317440146).

Atas kehadiran Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama,  
dan Hubungan Masyarakat,

Prof. Dr. Ir. Risfaheri, M.Si.  
NIP 196401171989031002

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Utama, Badan Pangan Nasional;
2. Kepala Biro/Pusat lingkup Badan Pangan Nasional.

Lampiran Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerja sama dan Hubungan Masyarakat

Nomor : 067/PR.04.03/A.1/02/2023

Tanggal : 02 Februari 2023

## **DAFTAR UNDANGAN**

1. Ir. R.M. Imron Rasjidi., M.Si
2. Prof.Dr.Ir.Risfaheri,M.Si
3. Muhamad Rozali, S.P
4. Duma Sari Simbolon, S.P.,M.Si
5. Erna Djati, S.H.,M.H
6. Taufik Azis, S.P
7. Todilah, S.A.P., M.A.P
8. Rus Kurniawati, S.P, M.Si
9. Jati Alam, S.P
10. Bramandita, S.Si, M.Si
11. Ahmad Burhanudin, S.P
12. Fuadiyah,S.P
13. Erma Kusumaningsih,ST.MPWK



Nomor : 093/PR.04.03/A.1/02/2023

09 Februari 2023

Sifat : Segera

Hal : Perubahan Tempat Reviu LAKIN Eselon I  
Lingkup Badan Pangan Nasional TA. 2022

Yth.

**(Mohon melihat daftar terlampir)**

di

Tempat.

Dalam rangka reviu Laporan Kinerja (LAKIN) Eselon I Lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

**Semula**

hari/tanggal : Senin-Selasa, 13-14 Februari 2023 (lihat lampiran)  
waktu : 13.30 WIB – selesai  
agenda : Reviu Laporan Kinerja  
tempat : The Margo Hotel, Jalan Margonda Raya Depok  
Kota Depok - Jawa Barat.

**Menjadi**

tempat : Hotel Salak The Heritage  
Jl. Ir. H. Juanda No.8, RT.01/RW.01, Bogor

Untuk keperluan reviu agar membawa dokumen LAKIN Eselon I dan data pendukung.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan,  
Kerja Sama dan Humas,



*Risfaheri*  
Prof. Dr. Ir. Risfaheri, M.Si  
NIP 196401171989031002

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional
2. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
3. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
4. Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Lampiran Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerja sama dan Humas

Nomor : 093/PR.04.03/A.1/02/2023

Tanggal : Februari 2023

## **DAFTAR UNDANGAN**

Peserta Reviu hari I (Senin, 13 Februari 2023, pukul 13.30 WIB– selesai)

1. Tri Aris Indrayanto,S.P.M.Si
2. Jan Pieter Sinaga,S.T.P.,M.Si
3. Arifayani Rachman, S.T.P.,M.Si
4. Erna Djati,S.H.,M.Si
5. Todilah, S.A.P.,M.A.P
6. Rus Kurniawati,S.P.,M.Si
7. Duma Sari Simbolon, S.P.M.Si
8. Bramandita,S.Si.M.Si

Peserta Reviu hari II (Selasa, 14 Februari 2023, pukul 08.30 WIB– selesai)

9. Dr. Tono,S.P.,M.Si
10. Akber Maulad S.Gz.,M.Gz
11. Sri Rebecca Sitorus S.T.P.,M.Si
12. Dr, Diah Chandra Aryani,S.T.P.,M.Sc
13. Apriyanto Dwi Nugroho,S.T.P.,M.Sc
14. Mulyana,S.P.,M.Si

## Rapat Penyusunan LAKIN Sekretariat Utama



Rapat Koordinasi Tim Pengelola Kinerja SAKIP Sektora BPN  
20/01/2023 09:02:26 AM



Rapat Koordinasi Tim Pengelola Kinerja SAKIP Sektora BPN  
20/01/2023 09:03:04 AM

## Reviu LAKIN Sekretariat Utama Oleh APIP Badan Pangan Nasional

